



BUKU PROFIL

KEPENDUDUKAN

KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku *"Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025"* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan analisis komprehensif terhadap dinamika kependudukan, mencakup pertumbuhan, persebaran, struktur usia, serta aspek-aspek sosial - ekonomi yang terkait. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kebijakan, akademisi praktisi, serta masyarakat luas dalam memahami perubahan demografi yang terjadi, sekaligus sebagai dasar untuk merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan.



Perkembangan kependudukan merupakan faktor strategis yang berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap tren dan tantangan kependudukan menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya. Oleh sebab itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan pada edisi berikutnya.

kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Marabahan, 20 April 2026

Kepala Dinas,

H. Arief Wisuda Wardana, S.STP., M.M.

NIP. 19861008 200602 1 002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	2
4. Sistematika Penulisan	2
5. Konsep dan Definisi	3
 BAB II GAMBARAN UMUM	 5
1. Letak Geografis	5
2. Kondisi Demografi Daerah	7
3. Kondisi Topografi	8
 BAB III SUMBER DATA	 9
 BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	 10
A. KUANTITAS	10
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk Tahun 2025	10
a) Jumlah dan proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin	10
b) Kepadatan Penduduk	12
c) Laju Pertumbuhan Penduduk	14
2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	16
a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .	16
1) Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	16
2) Piramida Penduduk	17
3) Rasio Ketergantungan	17
b) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin	19
1) Angka Perkawinan Kasar	20



2) Angka Perkawinan Umum	21
3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	22
4) Angka Perceraian Kasar	22
5) Angka Perceraian Umum	24
c) Keluarga	25
1) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	25
2) Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK)	26
3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	26
4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	28
5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	29
6) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	30
7) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan	31
d) Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	32
1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	32
2) Jumlah Penduduk Menurut Agama	34
3) Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Disabilitas	35
e) Kelahiran	36
1) Jumlah Kelahiran	36
2) Angka Kelahiran kasar	37
f) Kematian	38
1) Jumlah kematian	38
2) Angka Kematian Kasar	39
B. KUALITAS PENDUDUK	40
1. KESEHATAN	40
a) Kelahiran	40
1) Angka Kelahiran Umum	40
2) Rasio Ibu dan Anak	42
b) Kematian	42
1) Kematian Bayi dan Balita	43
2) Kematian Ibu	44
2. PENDIDIKAN	45
a) Angka Melek Huruf	45



b) Angka Partisipasi Kasar	45
c) Angka Partisipasi Murni	47
d) Angka Putus Sekolah	48
3. EKONOMI	48
a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja	48
1) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	49
b) Angka Partisipasi Angkatan Kerja	50
c) Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Pekerjaan	52
4. SOSIAL	55
a) Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas	55
C. MOBILITAS	56
1. Migrasi Masuk	56
2. Migrasi Keluar	56
3. Migrasi Neto	58
BAB V DOKUMEN KEPENDUDUKAN	62
A. Kepemilikan Kartu Keluarga	62
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	63
C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak	64
D. Identitas Kependudukan Digital	66
E. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	68
1. Akta Kelahiran	68
2. Akta Kematian	71
3. Akta Perkawinan	72
4. Akta Perceraian	73
BAB VI KESIMPULAN	75



DAFTAR TABEL

Hal

BAB II GAMBARAN UMUM

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala tahun 2025	6
-----------	--	---

BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala menurut Kecamatan Tahun 2025	11
Tabel 4.2	Kepadatan Penduduk	13
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	14
Tabel 4.4	Rasio Jenis Kelamin	16
Tabel 4.5	Rasio Ketergantungan Penduduk	18
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan	19
Tabel 4.7	Angka Perkawinan Kasar Per kecamatan Tahun 2025	20
Tabel 4.8	Angka Perkawinan Umum	21
Tabel 4.9	Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	22
Tabel 4.10	Angka Perceraian Kasar	23
Tabel 4.11	Angka Perceraian Umum	24
Tabel 4.12	Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	25
Tabel 4.13	Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK)	26
Tabel 4.14	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	27
Tabel 4.15	Distribusi Kepala Keluarga Berdasarkan Kecamatan	28
Tabel 4.16	Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	29
Tabel 4.17	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 4.18	Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan	31
Tabel 4.19	Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan yang di tamatkan	32
Tabel 4.20	Jumlah Penduduk Menurut Agama	33
Tabel 4.21	Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Disabilitas	34
Tabel 4.22	Jumlah Kelahiran	35
Tabel 4.23	Angka Kelahiran Kasar	36
Tabel 4.24	Jumlah Kematian	37
Tabel 4.25	Angka Kematian Kasar	38
Tabel 4.26	Angka Kelahiran Umum	40
Tabel 4.27	Rasio Ibu dan Anak	41
Tabel 4.28	Jumlah Kematian Bayi dan Balita	43



Tabel 4.29	Jumlah Kematian Ibu	44
Tabel 4.30	Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)	46
Tabel 4.31	Capaian Angka Partisipasi Murni (APM)	47
Tabel 4.32	Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	49
Tabel 4.33	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 4.34	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	52
Tabel 4.35	Migrasi Penduduk Masuk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	57
Tabel 4.36	Migrasi Penduduk Keluar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	58
Tabel 4.37	Migrasi Penduduk Netto Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	60

BAB V DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Tabel 5.1	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	63
Tabel 5.2	Jumlah Kepemilikan KTP-el	64
Tabel 5.3	Jumlah Kartu Identitas Anak	65
Tabel 5.4	Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	66
Tabel 5.5	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Seluruh Usia	68
Tabel 5.6	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-5 Tahun	69
Tabel 5.7	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	70
Tabel 5.8	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	71
Tabel 5.9	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	72
Tabel 5.10	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	73



DAFTAR GAMBAR

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM	
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Barito Kuala	6
Gambar 2.2 Diagram Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	7
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	
Gambar 4.1 Gambar Diagram Jumlah Penduduk Perkecamatan Menurut Jenis Kelamin	11
Gambar 4.2 Gambar Diagram Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan	13
Gambar 4.3 Gambar Diagram Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan	15
Gambar 4.4 Gambar Piramida Penduduk di Kabupaten Barito Kuala	17



INOVASI LAYANAN

	Hal
MACAM-MACAM INOVASI LAYANAN DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BARITO KUALA	76
1. DUKCAPIL DEKAT (Datang, Edukasi, Melayani Masyarakat)	76
2. TARUMADOKBIT (Daftar di Rumah Dokumen Terbit)	76
3. PAKRS (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit)	76
4. PAKODE (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)	76
5. KANDA (Kami Datang Dokumen Tercetak)	77
6. Gambar Inovasi Layanan	78

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan perkembangan Kabupaten Barito Kuala yang tidak lepas dari adanya berbagai fasilitas akomodasi yang tersedia, perkembangan tersebut menjadikan kabupaten Barito Kuala sebagai daya tarik tersendiri bagi para pendatang yang menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai tempat bermukim karena kedekatannya dengan Kota Banjarmasin, selain itu juga merupakan daerah migrasi dan pengimbang Kabupaten.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja menjadi subjek tetapi juga sekaligus menjadi objek pembangunan itu sendiri. Atas dasar pemikiran ini pembangunan masalah kependudukan diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan mobilitas penduduk.

Sejalan dengan hal tersebut Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan juga mengamanatkan agar pembangunan di bidang Kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi Kependudukan berskala Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan dapat dijadikan sebagai acuan dasar bagi sektor terkait dalam setiap kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi lainnya. Untuk itu Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 telah menegaskan bahwa data kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan informasi akan data dan indikator kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil - hasil pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan Kependudukan hingga wilayah kecamatan bahkan kelurahan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program - program kependudukan. Semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan saat ini mencakup lima hal pokok bahasan, antara lain:

1. Menyajikan perkembangan profil kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung.

2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya - upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk.
3. Teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah maupun nasional.
4. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan, kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya.
5. Mendorong terwujudnya database penduduk dan analisis data base kependudukan sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, sebagai salah satu informasi untuk dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi hasil - hasil pembangunan.

3. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 memuat deskripsi data dan analisis implikasi atas data:

1. Kuantitas Penduduk, meliputi Jumlah dan Komposisi serta Persebaran Penduduk menurut Demografi;
2. Kualitas Penduduk meliputi Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial;
3. Mobilitas (Migrasi) Penduduk, meliputi Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk;
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan, meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP-el, KIA, Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Akta Pencatatan Sipil

4. Sistematika Penulisan

Mengingat luasnya cakupan yang di analisis, penyusun membagi dalam enam bab sebagai berikut:

- | | |
|---------|------------------------------------|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Gambaran umum daerah |
| Bab III | : Sumber Data |
| Bab IV | : Perkembangan Kependudukan |
| Bab V | : Kepemilikan Dokumen Kependudukan |
| Bab VI | : Kesimpulan |

5. Konsep dan Definisi

- a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- b. Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- d. Data Kependudukan adalah data perorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- f. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- g. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat tanda kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap
- h. Profil Perkembangan Kependudukan adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
- i. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian yang layak.
- j. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal
- k. Mobilitas Penduduk adalah gerak ruangan penduduk dengan melewati batas Administrasi Daerah Tingkat II
- l. Rasio Jenis Kelamin (sex Rasio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan.



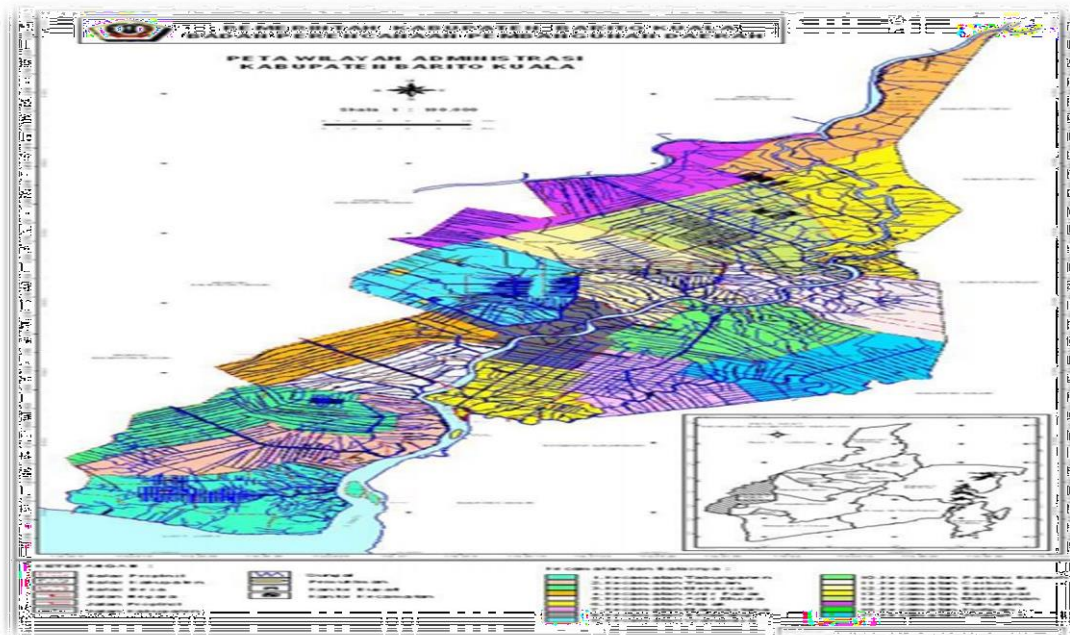
- m.** Kelahiran (Fertilitas) adalah kemampuan reproduksi nyata dari penduduk perempuan biasanya dinyatakan dalam ribuan penduduk perempuan usia produktif (15-49) dalam kependudukan dikenal 2 ukuran yang sering dipakai :
- ASFR (Aged Spesific Fertility Rate) adalah fertilitas menurut golongan umur ibu.
 - TFR (Total Fertility Rate) adalah fertilitas total (gabungan), tanpa memandang golongan ibu.
- n.** Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

BAB II**GAMBARAN UMUM****A. Letak Geografis Kabupaten Barito Kuala**

Kabupaten Barito Kuala yang ber-ibu kota Marabahan terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
 - Sebelah Selatan = Laut Jawa
 - Sebelah Timur = Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin
 - Sebelah Barat = Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- Dengan letak astronomis berada pada 2°29'50" - 3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur. Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 0% - 2%, dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Tanah Alluvial berwarna coklat hijau, tanah ini terdiri dari endapan Alluvium yang bahan induknya terutama termasuk dari pasir dan lumpur yang dibawa dan diendapkan oleh arus sungai dari pedalaman, tanah terdapat di sepanjang Sungai Barito dan tepi Sungai Kapuas, berupa tanggul-tanggul dan juga pada beberapa medeander sungai. Tanah Alluvial ini menutupi areal seluas 191.390 Ha, atau lebih kurang 64% dari luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dan merupakan daerah terbaik bagi pertanian pasang surut.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Barito Kuala



Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	LUAS WILAYAH	IBU KOTA KECAMATAN
1	Tabunganen	-	14	240	Tabunganen kecil
2	Tamban	-	16	164,3	Purwosari I
3	Anjir Pasar	-	15	126	Anjir Pasar Kota I
4	Anjir Muara	-	15	116,75	Anjir Muara Kota
5	Alalak	3	15	106,85	Handil Bakti
6	Mandastana	-	14	136	Puntik Luar
7	Rantau Badauh	-	9	261,81	Sei Gampa
8	Belawang	-	13	80,25	Belawang
9	Cerbon	-	8	206	Bantuil
10	Bakumpai	1	8	261	Lepasan
11	Kuripan	-	9	343,5	Rimbun tulang
12	Tabukan	-	11	166	Teluk Tamba
13	Mekarsari	-	9	143,5	Tamban Raya
14	Barambai	-	11	183	Barambai
15	Marabahan	2	8	221	Marabahan kota
16	Wanaraya	-	13	37,5	Kolam kiri
17	Jejangkit	-	7	203	Jejangkit pasar
	Jumlah	6	195	2.996,46	

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambarl 2.2 Diagram Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025



1. Kondisi Demografis Daerah

Jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 hingga tahun 2025 rata- rata mengalami kenaikan dengan pertumbuhan antara 0, 58 persen hingga 1,63 persen. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 318.044 jiwa, lalu tahun 2021 menurun 0,29 persen menjadi 317.118 jiwa, tahun 2022 meningkat sebesar 0,82 persen menjadi 319.708 jiwa. Tahun 2023 meningkat sebesar 1,50 persen menjadi 324.502 jiwa. Tahun 2025 menjadi 329.799 jiwa atau meningkat sebesar 1,63 persen. Kemudian Tahun 2025 menjadi 334.958 jiwa atau meningkat sebesar 1,56 persen.

Distribusi penduduk menurut kecamatan terbesar tahun 2025 adalah Kecamatan Alalak sebanyak 68.000 Sedangkan Jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 6.189 jiwa. Kalau lebih jauh dilihat keadaan dinamika kependudukan di Kabupaten Barito Kuala, terutama kalau ditinjau dari aspek persebaran dan kepadatan penduduk per kecamatan akan tergambar secara kuantitas Kecamatan Alalak merupakan kecamatan yang berpenduduk banyak yaitu 20,30 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan kecamatan dengan tingkat persebaran penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuripan yaitu 1,85 persen, padahal kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini terkait dengan letak dan kondisi geografis Kecamatan Kuripan itu sendiri dan belum terpenuhinya akses transportasi secara optimal. Akan tetapi jika dilihat dari tingkat kepadatannya dapat diketahui bahwa Kecamatan Alalak dan Wanaraya merupakan kecamatan yang padat penduduknya di Kabupaten Barito Kuala yaitu masing-masing sebesar 636,41 dan 414,40 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil masih dipegang



oleh Kecamatan Kuripan yaitu sekitar 18,02 jiwa/km². Hal ini wajar, mengingat wilayah paling luas dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Barito Kuala. Selebihnya, penduduk tersebar merata hampir di seluruh Kabupaten Barito Kuala.

2. Kondisi Topografi

Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 meter dari permukaan laut. Karena merupakan dataran rendah maka hampir di semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun yang dimanfaatkan untuk anyaman tikar, bakul dsb. Barito Kuala dibelah oleh Sungai Barito yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (Kecamatan Tabunganen) hingga ke-utara (Kecamatan Kuripan).

BAB III

SUMBER DATA

Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan memberikan pedoman yang komprehensif dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan di suatu daerah. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai sumber data yang digunakan. Data yang akurat dan relevan merupakan kunci dalam menghasilkan profil kependudukan yang valid dan dapat diandalkan. Data Registrasi menjadi sumber data utama dalam penyusunan profil kependudukan. Data ini diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD). Data registrasi meliputi berbagai informasi penting seperti jumlah penduduk, kelahiran, kematian, perpindahan, serta karakteristik penduduk lainnya. Melalui data registrasi, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang dinamika kependudukan suatu daerah. Data dari lintas sektor juga menjadi sumber data yang penting dalam penyusunan profil kependudukan. Data ini diperoleh dari berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan pembangunan. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sektor, kita dapat menganalisis hubungan antara perkembangan kependudukan dengan berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang sesuai. Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi yang mudah dipahami. Penyajian data yang efektif akan membantu pembaca memahami secara menyeluruh tentang perkembangan kependudukan di suatu daerah. Buku profil perkembangan kependudukan yang disusun berdasarkan pedoman Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah, peneliti, dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan. Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 telah memberikan kerangka yang jelas mengenai sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang tersedia, kita dapat menghasilkan profil kependudukan yang akurat, relevan, dan up-to-date.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu wilayah. Secara umum, kuantitas penduduk mengacu pada jumlah individu yang mendiami suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat terjadi secara alami, melalui kelahiran dan kematian, maupun melalui perpindahan penduduk (migrasi). Peningkatan kuantitas penduduk memiliki dua sisi yang perlu dicermati. Di satu sisi, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan apabila kualitas sumber daya manusianya baik. Namun di sisi lain, lonjakan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan yang tepat dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, pengangguran, serta tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan kuantitas penduduk menjadi aspek strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyebaran informasi kependudukan yang merata menjadi langkah penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kuantitas penduduk dan kualitas hidup.

Berikut ini adalah rincian mengenai kuantitas penduduk Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025, dimana data yang didapat bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Kemendagri semester II Tahun 2025

1. Jumlah Dan Persebaran Penduduk Tahun 2025

a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Persebaran penduduk Kabupaten Barito Kuala dengan luas wilayah 2.996,46 Km² tidaklah merata dari segi Kuantitas memang cukup mengesankan bila dilihat dari perkembangan dari tahun ketahun, menurut data DKB (Data konsolidasi bersih) kemendagri Kabupaten Barito Kuala pada Akhir Tahun 2025 berjumlah terdiri dari laki-laki 169.639 jiwa dan perempuan 165.319 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

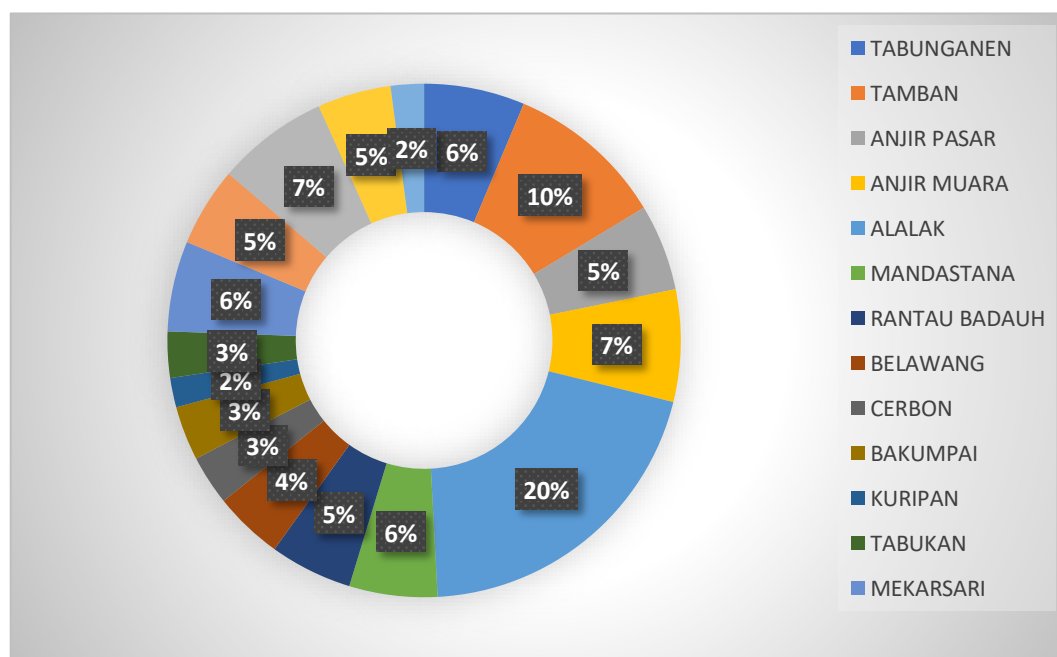


Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Perkecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	KECAMATAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK
1	TABUNGANEN	10.804	10.466	21.270
2	TAMBAN	17.043	16.470	33.513
3	ANJIR PASAR	9.178	9.051	18.229
4	ANJIR MUARA	11.982	11.670	23.652
5	ALALAK	34.314	33.686	68.000
6	MANDASTANA	9.395	9.200	18.595
7	RANTAU BADAUH	8.739	8.631	17.370
8	BELAWANG	7.439	7.188	14.627
9	CERBON	5.312	5.171	10.483
10	BAKUMPAI	5.930	5.522	11.452
11	KURIPAN	3.174	3.015	6.189
12	TABUKAN	4.910	4.819	9.729
13	MEKARSARI	9.691	9.379	19.070
14	BARAMBAI	8.449	8.240	16.689
15	MARABAHAN	11.752	11.799	23.551
16	WANARAYA	7.938	7.602	15.540
17	JEJANGKIT	3.589	3.410	6.999
JUMLAH		169.639	165.319	334.958

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Gambar 4.1 Diagram Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Perkecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas, total jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala yang tersebar di 17 kecamatan mencapai 334.958 jiwa, dengan rincian 169.639 jiwa laki-laki dan 165.319 jiwa perempuan. Data ini mencerminkan distribusi penduduk yang cukup merata, meskipun terdapat perbedaan signifikan antar wilayah kecamatan.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Alalak dengan total (68.000 jiwa), disusul oleh Kecamatan Tamban (33.513 jiwa) dan Kecamatan Anjir Muara (23.652 jiwa). Ketiga kecamatan ini menjadi pusat konsentrasi penduduk yang tinggi, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, aktivitas ekonomi, dan ketersediaan layanan publik yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya.

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kuripan dengan (6.189 jiwa), diikuti oleh Kecamatan Jejangkit (6.999 jiwa) dan Kecamatan Tabukan (9.729 jiwa). Jumlah penduduk yang relatif rendah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, keterbatasan sarana prasarana, serta peluang ekonomi yang masih terbatas.

Distribusi kuantitas penduduk ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam hal pemerataan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, serta program-program kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi yang adaptif dan inklusif agar pertumbuhan penduduk dapat dikelola secara seimbang, tidak hanya berfokus pada daerah padat penduduk, tetapi juga memperhatikan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit namun memiliki potensi pengembangan.

b) Kepadatan Penduduk

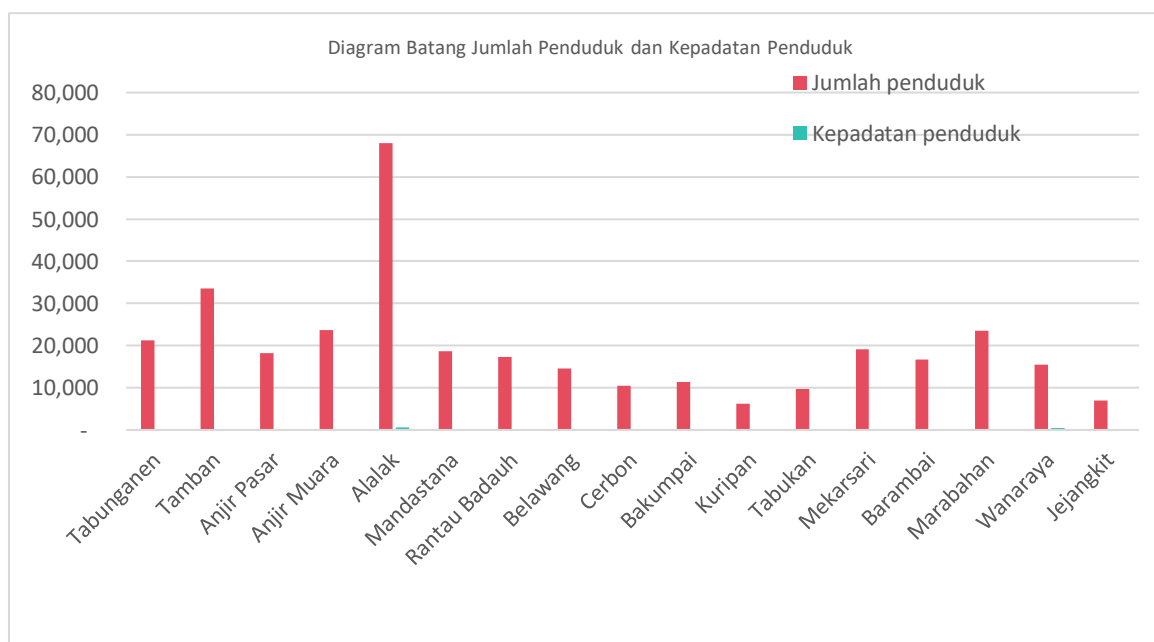
Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah. Kepadatan penduduk berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Kepadatan penduduk umum, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempatinya. Rumusnya : $\text{Kepadatan aritmatik} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Luas wilayah}} \times 1 \text{ km}^2$ Jika pada banyak kabupaten lain jumlah penduduk perempuan mendominasi jumlah penduduk laki – laki, maka di Kabupaten Barito Kuala lebih di dominasi oleh penduduk laki laki. Dilihat dari distribusinya penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan tidak merata ini disebabkan terjadinya perbedaan pengembangan daerah sehingga mengalami demografis-geologis yang harus dihadapi dalam pembangunan terutama pemerataan pembangunan yang akan dijadikan tolak ukur, tingginya permasalahan sosial seperti banyaknya pengangguran dan lapangan pekerjaan yang sangat sulit di cari, sehingga penduduk Barito Kuala banyak yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu pekerjaan di luar Kabupaten Barito Kuala lebih banyak memberikan kehidupan yang lebih baik dan menjanjikan

Tabel 4.2 Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
1	TABUNGANEN	21.270	240,00	88,63
2	TAMBAN	33.513	164,30	203,97
3	ANJIR PASAR	18.229	126,00	144,67
4	ANJIR MUARA	23.652	116,75	202,59
5	ALALAK	68.000	106,85	636,41
6	MANDASTANA	18.595	136,00	136,73
7	RANTAU BADAUH	17.370	261,81	66,35
8	BELAWANG	14.627	80,25	182,27
9	CERBON	10.483	206,00	50,89
10	BAKUMPAI	11.452	261,00	43,88
11	KURIPAN	6.189	343,50	18,02
12	TABUKAN	9.729	166,00	58,61
13	MEKARSARI	19.070	143,50	132,89
14	BARAMBAI	16.689	183,00	91,20
15	MARABAHAN	23.551	221,00	106,57
16	WANARAYA	15.540	37,50	414,40
17	JEJANGKIT	6.999	203,00	34,48
JUMLAH		334.958	2.996,46	111,78

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Gambar 4.2 Diagram Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan



Berdasarkan tabel diatas, jumlah total penduduk Kabupaten Barito Kuala mencapai 334.958 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan dengan total luas wilayah sebesar 2.996,46 km². Dengan demikian, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Barito Kuala adalah sekitar 111,78 jiwa per km². Namun, kepadatan penduduk tidak tersebar merata di seluruh kecamatan. Beberapa wilayah menunjukkan konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kecamatan Alalak tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 68.000 jiwa dan juga memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 636,41 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Alalak merupakan pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang menarik arus migrasi dan pertumbuhan penduduk alami yang tinggi. Di sisi lain, Kecamatan Kuripan mencatat kepadatan penduduk terendah, yakni hanya 18,02 jiwa per km², meskipun memiliki wilayah terluas (343,50 km²). Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Jejangkit dan Bakumpai yang memiliki kepadatan rendah dengan luas wilayah cukup besar. Rendahnya kepadatan ini bisa mencerminkan keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, atau aktivitas ekonomi yang masih minim. Kecamatan Wanaraya menjadi contoh menarik karena meskipun luas wilayahnya tergolong kecil (37,50 km²), kepadatan penduduknya sangat tinggi yaitu 414,40 jiwa per km², menunjukkan tingkat urbanisasi dan konsentrasi penduduk yang signifikan di daerah tersebut.

c) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan – kekuatan yang menambah dan kekuatan – kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN 2024	PENDUDUK TAHUN 2025	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	TABUNGANEN	21.199	21.270	0,33
2	TAMBAN	33.202	33.513	0,94
3	ANJIR PASAR	17.967	18.229	1,46
4	ANJIR MUARA	23.437	23.652	0,92
5	ALALAK	65.537	68.000	3,76
6	MANDASTANA	18.408	18.595	1,02
7	RANTAU BADAUH	17.258	17.370	0,65
8	BELAWANG	14.513	14.627	0,79
9	CERBON	10.365	10.483	1,14
10	BAKUMPAI	11.300	11.452	1,35
11	KURIPAN	6.166	6.189	0,37
12	TABUKAN	9.645	9.729	0,87
13	MEKARSARI	18.871	19.070	1,05
14	BARAMBAI	16.543	16.689	0,88
15	MARABAHAN	23.194	23.551	1,54
16	WANARAYA	15.291	15.540	1,63
17	JEJANGKIT	6.903	6.999	1,39
JUMLAH		329.799	334.958	1,56

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

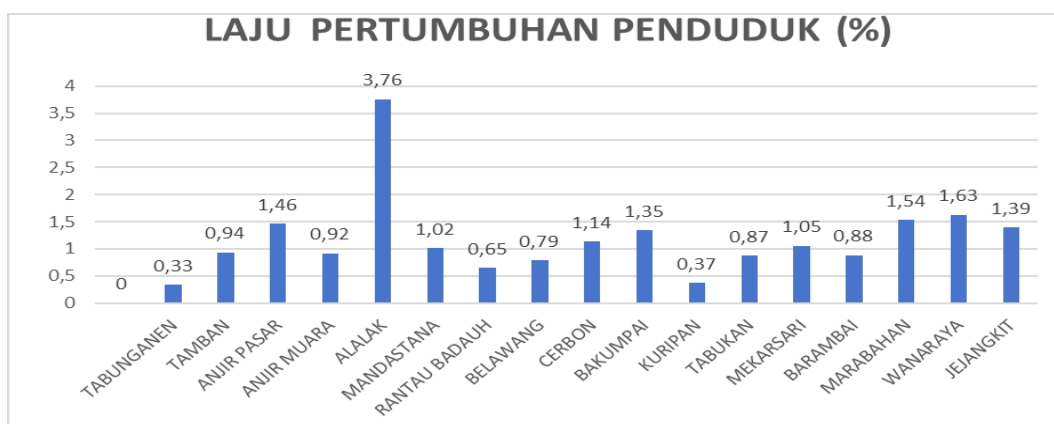
Jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari 329.799 jiwa pada tahun 2024 menjadi 334.958 jiwa pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56 % secara keseluruhan dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan jumlah penduduk ini tersebar di seluruh kecamatan, dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Kecamatan Alalak mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 3,76 %, menandakan tingginya dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, yang kemungkinan didorong oleh urbanisasi, migrasi masuk, serta tingkat kelahiran yang relatif tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang cepat, Kecamatan Alalak berpotensi mengalami tekanan terhadap layanan publik dan infrastruktur jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, Kecamatan Tabunganen memiliki laju pertumbuhan paling rendah, yaitu hanya 0,33 %. Ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat stabil atau bahkan mendekati stagnan. Laju pertumbuhan rendah juga terlihat di Kecamatan Kuripan (0,37%) dan Rantau Badauh (0,65%), yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, aksesibilitas yang terbatas, atau rendahnya arus migrasi ke wilayah tersebut.

Sebagian besar kecamatan mencatat laju pertumbuhan antara 0,6% hingga 1,6%, mencerminkan tren pertumbuhan yang moderat. Beberapa di antaranya seperti Anjir Pasar (1,46%), Marabahan (1,54%), dan Wanaraya (1,63%) menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dan terkendali.

Pertumbuhan penduduk ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, pertumbuhan yang sehat dapat mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan tenaga kerja dan permintaan pasar. Namun di sisi lain, laju pertumbuhan yang tinggi, terutama di wilayah padat seperti Alalak dan Wanaraya, menuntut perencanaan tata ruang dan pelayanan publik yang adaptif.

Dengan adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antar kecamatan, penting bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menyusun strategi pembangunan yang seimbang, baik untuk wilayah yang tumbuh pesat maupun wilayah yang relatif stagnan, guna menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Gambar 4.3 Diagram Laju Pertumbuhan Penduduk Perkecamatan



2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

a) Jumlah dan Proporsi penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

1) Rasio Jenis Kelamin

Tabel 4.4 Rasio Jenis Kelamin

NO	Struktur Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis Kelamin
1	0-4	10.700	9.907	20.607	108,00
2	5-9	13.755	13.087	26.842	105,10
3	10-14	14.644	13.999	28.643	104,61
4	15-19	14.254	13.604	27.858	104,78
5	20-24	14.400	13.251	27.651	108,67
6	25-29	12.500	11.423	23.923	109,43
7	30-34	12.898	12.002	24.900	107,47
8	35-39	12.738	12.608	25.346	101,03
9	40-44	13.138	13.105	26.243	100,25
10	45-49	12.898	12.882	25.780	100,12
11	50-54	11.203	11.533	22.736	97,14
12	55-59	9.588	9.524	19.112	100,67
13	60-64	6.849	6.610	13.459	103,62
14	65-69	4.710	5.103	9.813	92,30
15	70-74	2.746	2.674	5.420	102,69
16	> 75	2.618	4.007	6.625	65,34
Jumlah		169.639	165.319	334.958	102,61

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 adalah 334.958 jiwa, yang terdiri dari 169.639 laki-laki dan 165.319 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,61. Artinya, secara keseluruhan terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, menunjukkan keseimbangan yang relatif normal dalam distribusi jenis kelamin.

Jika ditinjau berdasarkan struktur umur, kelompok usia terbanyak berada pada rentang 10–14 tahun dengan jumlah 28.643 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 15–19 tahun (27.858 jiwa) dan 20 - 24 tahun (27.651 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif awal, yang berpotensi menjadi modal pembangunan daerah di masa mendatang.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (>75 tahun) hanya mencakup 6.625 jiwa, dan merupakan kelompok dengan rasio jenis kelamin paling rendah, yaitu 65,34 menunjukkan bahwa jumlah perempuan lanjut usia jauh lebih banyak dibanding laki-laki, sejalan dengan tren umum bahwa perempuan memiliki harapan hidup lebih tinggi. Kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi struktur penduduk, yang mencerminkan potensi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi. Namun, kehadiran kelompok usia muda (0–14 tahun) yang cukup besar juga menjadi indikator beban

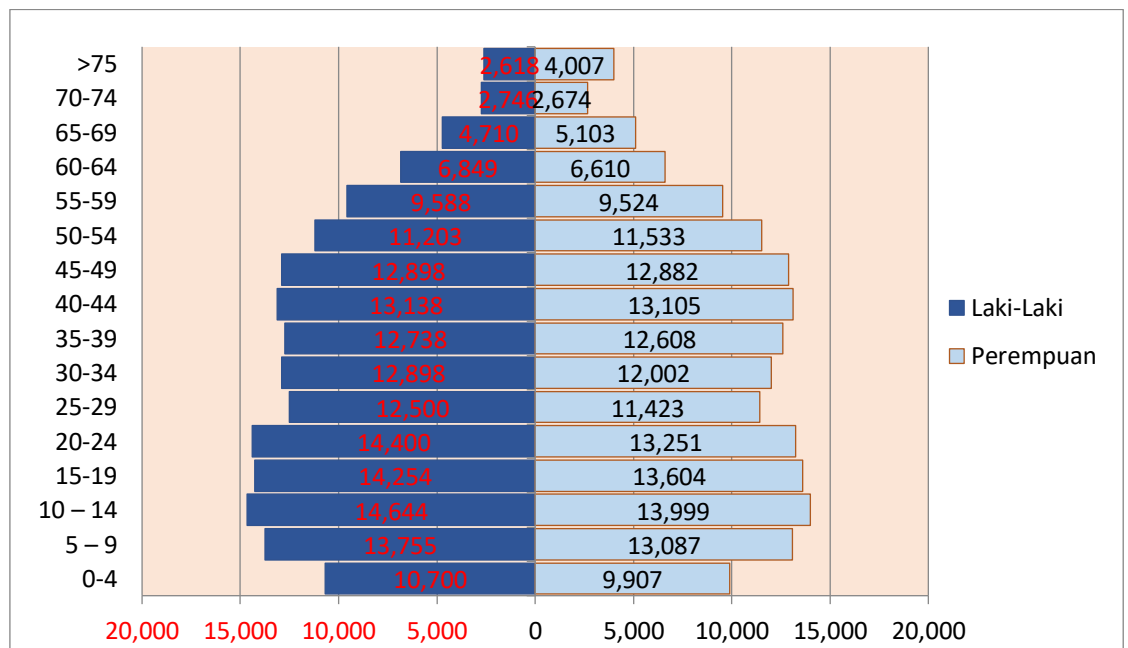
ketergantungan yang perlu dikelola melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan struktur penduduk yang relatif muda dan produktif, dengan distribusi jenis kelamin yang seimbang. Ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan jangka panjang, terutama dalam sektor ketenagakerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok usia yang dominan.

2) Piramida Penduduk

Struktur Umur penduduk menurut jenis Kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menggambarkan jumlah penduduk dan badan piramida kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki – laki dan perempuan. Kabupaten Barito Kuala menunjukkan struktur Penduduk konstruktif dengan struktur Penduduk usia Produktif lebih besar dari pada kelompok usia muda dan tua

Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025



Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

3) Rasio ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

Penduduk Muda berusia 0 – 14 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara penduduk berusia 65 tahun dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 -64 tahun merupakan penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi, sedangkan persentase Rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 4.5
Rasio Ketergantungan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	USIA MUDA	USIA PRODUKTIF	USIA TUA	RASIO KETERGANTUNGAN MUDA	RASIO KETERGANTUNGAN TUA	RASIO KETERGANTUNGAN TOTAL
1	TABUNGANEN	4.898	15.110	1.262	32,42	8,35	40,77
2	TAMBAN	7.035	23.989	2.489	29,33	10,38	39,7
3	ANJIR PASAR	3.933	12.836	1.460	30,64	11,37	42,01
4	ANJIR MUARA	5.443	16.808	1.401	32,38	8,34	40,72
5	ALALAK	16.546	48.389	3.065	34,19	6,33	40,53
6	MANDASTANA	4.425	12.929	1.241	34,23	9,6	43,82
7	RANTAU BADAUH	3.852	12.267	1.251	31,4	10,2	41,6
8	BELAWANG	3.166	10.346	1.115	30,6	10,78	41,38
9	CERBON	2.255	7.437	791	30,32	10,64	40,96
10	BAKUMPAI	2.576	8.257	619	31,2	7,5	38,69
11	KURIPAN	1.349	4.497	343	30	7,63	37,63
12	TABUKAN	2.349	6.748	632	34,81	9,37	44,18
13	MEKARSARI	4.222	13.356	1.492	31,61	11,17	42,78
14	BARAMBAI	3.799	11.734	1.156	32,38	9,85	42,23
15	MARABAHAN	5.228	16.748	1.575	31,22	9,4	40,62
16	WANARAYA	3.441	10.602	1.497	32,46	14,12	46,58
17	JEJANGKIT	1.575	4.955	469	31,79	9,47	41,25
JUMLAH		76.092	237.008	21.858	32,11	9,22	41,33

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa total jumlah penduduk usia muda mencapai 76.092 jiwa, usia produktif 237.008 jiwa, dan usia tua 21.858 jiwa. Dari keseluruhan data tersebut, didapatkan rasio ketergantungan muda sebesar 32,11, rasio ketergantungan tua sebesar 9,22, dan rasio ketergantungan total sebesar 41,33. Rasio ketergantungan mencerminkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk mendukung penduduk yang tergolong tidak produktif

(usia muda dan tua). Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar pula beban yang dipikul oleh kelompok usia produktif.

Dari 17 kecamatan, Kecamatan Wanaraya memiliki rasio ketergantungan total tertinggi yaitu 46,58, yang dipicu oleh rasio ketergantungan tua yang cukup tinggi (14,12) dibanding kecamatan lain. Hal ini menunjukkan tingginya proporsi penduduk lanjut usia di wilayah tersebut yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Sebaliknya, Kecamatan Kuripan mencatatkan rasio ketergantungan total paling rendah, yaitu 37,63, menunjukkan beban ekonomi pada kelompok usia produktif di wilayah ini relatif lebih ringan dibanding kecamatan lainnya.

Kecamatan Alalak menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di semua kategori usia, mencerminkan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Meskipun begitu, rasio ketergantungan total di Alalak masih tergolong moderat (40,53), berkat tingginya proporsi penduduk usia produktif.

Secara umum, sebagian besar kecamatan menunjukkan rasio ketergantungan total antara 38 hingga 44, yang menandakan bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 38 hingga 44 orang dari kelompok usia muda dan tua. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sosial ekonomi dan penyediaan layanan publik.

Penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengelola program-program pemberdayaan penduduk usia produktif sekaligus mempersiapkan sistem dukungan yang memadai untuk kelompok usia muda (sekolah, pelatihan) dan usia tua (layanan kesehatan, jaminan sosial) demi menjaga keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh kecamatan.

b) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK	PERSENTASE (%)
BELUM KAWIN	81.368	64.789	146.157	43,63
KAWIN	81.938	81.519	163.457	48,80
CERAI HIDUP	2.852	4.084	6.936	2,07
CERAI MATI	3.481	14.927	18.408	5,50
JUMLAH	169.639	165.319	334.958	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Kabupaten Barito Kuala, status kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 48,80% atau 163.457 orang dimana komposisi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yang kedua yaitu kategori belum kawin sebesar 43,63 % dimana proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sedangkan status cerai mati persentasenya sebesar

5,50% dan status perkawinan yang terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 2,07% atau sebanyak 6.936 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada status perkawinan cerai hidup yang lebih sedikit dibanding cerai mati dapat membuktikan bahwa jumlah hubungan keluarga yang harmonis di Kabupaten Barito Kuala cukup tinggi dikarenakan penduduk yang berstatus cerai hidup paling sedikit.

1) Angka Perkawinan Kasar

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada “ waktu tertentu” berguna bagi pemerintah kabupaten Barito Kuala dalam menentukan program kependudukan. Kelahiran dan Upaya -upaya peningkatan kualitas keluarga di lingkup kabupaten barito kuala. Angka perkawinan kasar menunjukkan jumlah perkawinan per -1000 penduduk terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu, tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin. Angka perkawinan kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk dalam satu tahun wilayah tertentu.

Rumus perhitungan Angka Perkawinan Kasar :

$$\text{Rumus Angka Perkawinan Kasar} = \frac{\text{Jumlah perkawinan dalam 1 tahun}}{\text{jumlah penduduk pertengahan tahun}} \times 1000$$

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2025, angka perkawinan kasar penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah 5,65 sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel 4.7 Angka Perkawinan Kasar Per Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
1	TABUNGANEN	95	21.206	4,48
2	TAMBAN	174	33.384	5,21
3	ANJIR PASAR	79	18.110	4,36
4	ANJIR MUARA	97	23.586	4,11
5	ALALAK	363	66.578	5,45
6	MANDASTANA	124	18.532	6,69
7	RANTAU BADAUH	96	17.323	5,54
8	BELAWANG	67	14.575	4,6
9	CERBON	53	10.409	5,09
10	BAKUMPAI	93	11.372	8,18
11	KURIPAN	42	6.182	6,79
12	TABUKAN	45	9.683	4,65
13	MEKARSARI	78	18.984	4,11
14	BARAMBAI	109	16.595	6,57
15	MARABAHAN	191	23.351	8,18
16	WANARAYA	132	15.392	8,58
17	JEJANGKIT	40	6.916	5,78
BARITO KUALA		1.878	332.178	5,65

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada pelaksanaannya pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Regulasi yang baru, terdapat perubahan pada batas minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan dipersamakan 19 tahun. Batas usia tersebut, dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, mengurangi resiko perceraian dan mengurangi laju kelahiran serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Angka perkawinan kasar menunjukkan penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun di suatu periode tertentu. Angka Perkawinan Kasar dilihat dari setiap kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Wanaraya merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 8,58 dibandingkan dengan kecamatan lain.

2) Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka perkawinan umum sedikit lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar, karena factor pembagiannya adalah penduduk dalam “usia kawin”. Angka Perkawinan umum dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Angka Perkawinan Umum} = \frac{\text{Jumlah Perkawinan Dalam Satu Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk pertengahan tahun pada usia 15 tahun keatas}}$$

Berikut data Angka Perkawinan Umum di berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025:

Tabel 4.8 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN	PENDUDUK USIA >15 TAHUN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
1	TABUNGANEN	95	16.372	5,8
2	TAMBAN	174	26.478	6,57
3	ANJIR PASAR	79	14.296	5,53
4	ANJIR MUARA	97	18.209	5,33
5	ALALAK	363	51.454	7,05
6	MANDASTANA	124	14.170	8,75
7	RANTAU BADAUH	96	13.518	7,1
8	BELAWANG	67	11.461	5,85
9	CERBON	53	8.228	6,44
10	BAKUMPAI	93	8.876	10,48
11	KURIPAN	42	4.840	8,68
12	TABUKAN	45	7.380	6,1
13	MEKARSARI	78	14.848	5,25
14	BARAMBAI	109	12.890	8,46
15	MARABAHAN	191	18.323	10,42
16	WANARAYA	132	12.099	10,91
17	JEJANGKIT	40	5.424	7,37
BARITO KUALA		1.878	258.866	7,25

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Angka perkawinan umum merupakan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu. Seperti angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembagiannya adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin. Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya tidak berisiko kawin.

3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Tabel 4.9 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

UMUR	JUMLAH PENDUDUK			PENDUDUK BERSTATUS KAWIN			ANGKA PERKAWINAN
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
15-19	14.254	13.604	27.858	22	192	214	7,68
20-24	14.400	13.251	27.651	1.811	4.421	6.232	225,38
25-29	12.500	11.423	23.923	5.733	8.356	14.089	588,93
30-34	12.898	12.002	24.900	8.850	10.600	19.450	781,12
35-39	12.738	12.608	25.346	10.047	11.423	21.470	847,08
40-44	13.138	13.105	26.243	11.299	11.717	23.016	877,03
45-49	12.898	12.882	25.780	11.396	11.028	22.424	869,82
50-54	11.203	11.533	22.736	10.062	9.187	19.249	846,63
55-59	9.588	9.524	19.112	8.531	6.702	15.233	797,04
60-64	6.849	6.610	13.459	6.017	3.922	9.939	738,46
65-69	4.710	5.103	9.813	4.019	2.400	6.419	654,13
70-74	2.746	2.674	5.420	2.231	888	3.119	575,46
>75	2.618	4.007	6.625	1.920	683	2.603	392,91
JUMLAH	130.540	128.326	258.866	81.938	81.519	163.457	631,43

Sumber: DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas, sebanyak 163.457 orang telah berstatus kawin, terdiri dari 81.938 laki-laki dan 81.519 perempuan. Angka perkawinan secara keseluruhan tercatat sebesar 631,43, yang menggambarkan jumlah penduduk kawin per 1.000 penduduk. Usia Remaja (15–19 tahun) Pada kelompok usia ini, jumlah penduduk mencapai 27.858 jiwa. Namun, hanya 214 orang (0,77%) yang telah menikah, dengan angka perkawinan terendah yaitu 7,68. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan dini sudah relatif jarang, terutama pada laki-laki (hanya 22 orang menikah), meskipun masih ada kecenderungan lebih tinggi pada perempuan (192 orang menikah). Pada Usia Muda Produktif (20–34 tahun) Ini menunjukkan bahwa rentang usia 25–34 merupakan fase puncak awal dalam pernikahan, dengan perempuan sedikit lebih dominan dalam angka pernikahan dibanding laki-laki.

4) Angka Perceraian Kasar

Angka Perkawinan Kasar menunjukan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Perceraian mempunyai implikasi demografi sekaligus implikasi sosiologis.

Implikasi demografi adalah mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologis lebih kepada status cerai terhadap Perempuan dan anak – anak mereka.

Cara menghitung angka perceraian kasar dihitung dengan membagi kasus perceraian yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun disuatu wilayah tertentu.

$$C = \frac{c}{p} \times 1000 \quad C = \text{Jumlah Perceraian yang terjadi selama satu tahun}$$

p = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama

c = Angka Perceraian Kasar

Tabel 4.10 Angka Perceraian Kasar Menurut Kecamatan tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN 2025	PERCERAIAN KASAR
1	TABUNGANEN	33	21.206	1,56
2	TAMBAN	76	33.384	2,28
3	ANJIR PASAR	41	18.110	2,26
4	ANJIR MUARA	87	23.586	3,69
5	ALALAK	208	66.578	3,12
6	MANDASTANA	32	18.532	1,73
7	RANTAU BADAUH	32	17.323	1,85
8	BELAWANG	43	14.575	2,95
9	CERBON	34	10.409	3,27
10	BAKUMPAI	32	11.372	2,81
11	KURIPAN	10	6.182	1,62
12	TABUKAN	20	9.683	2,07
13	MEKARSARI	47	18.984	2,48
14	BARAMBAI	54	16.595	3,25
15	MARABAHAN	78	23.351	3,34
16	WANARAYA	35	15.392	2,27
17	JEJANGKIT	16	6.916	2,31
BARITO KUALA		878	332.178	2,64

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan tabel diatas Pada tahun 2025, jumlah perceraian di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 878 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang mencapai 332.178 jiwa, maka diperoleh angka perceraian kasar sebesar 2,64 per 1.000 penduduk.

Angka perceraian kasar merupakan indikator yang menggambarkan jumlah perceraian setiap 1.000 penduduk dalam satu tahun. Data ini penting untuk mengukur kestabilan sosial serta menjadi salah satu indikator kesejahteraan keluarga dan masyarakat di tingkat daerah.

Bila dilihat lebih rinci per kecamatan, Kecamatan Anjir Muara mencatat angka perceraian kasar tertinggi, yaitu 3,69 per 1.000 penduduk, diikuti oleh Kecamatan Marabahan (3,34) dan Cerbon (3,27). Angka-angka ini menunjukkan bahwa dalam wilayah- wilayah tersebut, proporsi perceraian terhadap jumlah penduduk relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya.

5) Angka Perceraian Umum

Proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka perceraian umum dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai. Pembaginya adalah penduduk 15 tahun keatas dimana penduduk bersangkutan lebih berisiko cerai. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena umumnya mereka tidak berisiko cerai. Angka perkawinan umum menunjukkan informasi yang lebih baik karena memperhitungkan umur dan factor resiko.

Cara menghitung untuk memperoleh angka perceraian yang lebih spesifik bisa dihitung dengan angka perceraian umum, yang sudah memperhitungkan penduduk yang terkena resiko perceraian yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas atau disebut penduduk yang berumur divorceable. Rumus umum yang digunakan adalah

$$C15+ = \frac{C}{P15+} \times 1000$$

C15+ = angka Perceraian umum

P 15 = Penduduk 15 tahun keatas pada pertengahan tahun

C = Perceraian yang terjadi dalam satu tahun

Tabel 4.11 Angka Perceraian Umum Menurut Kecamatan Tahun 2025

N O	KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN	JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS TENGAH TAHUN 2025	ANGKA PERCERAIAN UMUM
1	TABUNGANEN	33	16.372	2,02
2	TAMBAN	76	26.478	2,87
3	ANJIR PASAR	41	14.296	2,87
4	ANJIR MUARA	87	18.209	4,78
5	ALALAK	208	51.454	4,04
6	MANDASTANA	32	14.170	2,26
7	RANTAU BADAUH	32	13.518	2,37
8	BELAWANG	43	11.461	3,75
9	CERBON	34	8.228	4,13
10	BAKUMPAI	32	8.876	3,61
11	KURIPAN	10	4.840	2,07
12	TABUKAN	20	7.380	2,71
13	MEKARSARI	47	14.848	3,17
14	BARAMBAI	54	12.890	4,19
15	MARABAHAN	78	18.323	4,26
16	WANARAYA	35	12.099	2,89
17	JEJANGKIT	16	5.424	2,95
BARITO KUALA		878	258.866	3,39

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas, jumlah kasus perceraian di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 878 kasus, dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 258.866 jiwa. Ini menghasilkan angka perceraian umum sebesar 3,39 per 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata angka perceraian di Barito Kuala adalah 3,39 per 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka perceraian tertinggi dicapai di Anjir Muara (4,78), sementara terendah di Tabunganen (2,02). Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tekanan ekonomi, urbanisasi, serta akses terhadap lembaga peradilan kemungkinan besar memengaruhi tingkat perceraian antar kecamatan.

c) Keluarga

Keluarga menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 1988 adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Atau definisi keluarga dapat lebih disederhanakan menjadi sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Indikator untuk menggambarkan kondisi keluarga, antara lain jumlah keluarga dan rata – rata jumlah anggota keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status Kawin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan Pendidikan, dan karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan

1) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Kesejahteraan dan kondisi umum sebuah keluarga bisa dilihat dan tergambar dan dilihat daripada jumlah anggota keluarga. Hal ini didasarkan atas asumsi semakinkecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, begitupun yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di kabupaten barito kuala. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 4.12 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Tahun 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RATA-RATA ANGGOTA KELUARGA
1	TABUNGANEN	21.270	7.524	2,83
2	TAMBAN	33.513	11.842	2,83
3	ANJIR PASAR	18.229	6.522	2,80
4	ANJIR MUARA	23.652	8.115	2,91
5	ALALAK	68.000	22.147	3,07
6	MANDASTANA	18.595	6.304	2,95
7	RANTAU BADAUH	17.370	6.024	2,88
8	BELAWANG	14.627	5.185	2,82
9	CERBON	10.483	3.688	2,84
10	BAKUMPAI	11.452	4.071	2,81
11	KURIPAN	6.189	2.240	2,76
12	TABUKAN	9.729	3.421	2,84
13	MEKARSARI	19.070	6.601	2,89
14	BARAMBAI	16.689	5.667	2,94
15	MARABAHAN	23.551	8.078	2,92
16	WANARAYA	15.540	5.491	2,83
17	JEJANGKIT	6.999	2.390	2,93
	BARITO KUALA	334.958	115.310	2,90

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk dari adanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri satu sama lain yang dinamakan perkawinan. Keluarga dipimpin oleh Kepala Keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan keluarga yakni kesejahteraan keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari sudut pandang banyaknya anggota keluarga. Nilai rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Barito Kuala sebesar 2,92 artinya pada setiap keluarga rata-rata terdiri dari 2 - 3 orang.

2) Status Hubungan Dengan Keluarga (SHDK)

Anak, istri, menantu, cucu bahkan pembantu menjadi objek penting adanya “status hubungan dengan kepala keluarga”. Jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dalam keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola asuh anak dalam suatu keluarga. Secara data yang sudah terkumpul “Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga” dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga tahun 2025

NO	STATUS HUBUNGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPALA KELUARGA	91.614	23.696	115.310
2	SUAMI	13	0	13
3	ISTERI	0	76.783	76.783
4	ANAK	75.482	61.655	137.137
5	MENANTU	2	6	8
6	CUCU	750	557	1.307
7	ORANG TUA	41	604	645
8	MERTUA	40	298	338
9	FAMILI LAIN	1.310	1.141	2.451
10	PEMBANTU	0	1	1
11	LAINNYA	387	578	965
BARITO KUALA		169.639	165.319	334.958

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Adapun Kepala Keluarga dilihat dari pada aspek kelompok umur dengan rentang umur 5 tahun sebagai berikut:

Tabel 4.14 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH KEPALA KELUARGA	%
1	00-04	0	0,00
2	05-09	0	0,00
3	10-14	0	0,00
4	15-19	258	0,22
5	20-24	2.950	2,56
6	25-29	7.268	6,30
7	30-34	10.778	9,35
8	35-39	12.274	10,64
9	40-44	13.681	11,86
10	45-49	14.468	12,55
11	50-54	13.553	11,75
12	55-59	12.593	10,92
13	60-64	9.704	8,42
14	65-69	7.552	6,55
15	70-74	4.575	3,97
16	>75	5.656	4,91
JUMLAH		115.310	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data distribusi jumlah kepala keluarga menurut kelompok umur, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kepala keluarga berada pada usia produktif, khususnya rentang usia 25 hingga 54 tahun. Kelompok umur 45-49 tahun mencatat jumlah tertinggi dengan 14.468 kepala keluarga (12,55%), disusul oleh kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 13.681 (11,86%) dan 50-54 tahun sebanyak 13.553 (11,75%). Hal ini mencerminkan dominasi usia matang dan mapan dalam struktur keluarga.

Secara keseluruhan, kelompok usia 25-54 tahun mencakup lebih dari setengah dari total kepala keluarga, yaitu sekitar 62,46%. Sementara itu, kelompok usia lanjut (>60 tahun) masih mencakup sekitar 23,84%, yang menunjukkan perlunya perhatian terhadap kesejahteraan dan layanan sosial bagi lansia yang masih memegang peran sebagai kepala keluarga.

Jumlah kepala keluarga yang sangat sedikit pada kelompok umur 15-24 tahun (hanya 2,78%) menunjukkan bahwa peran kepala keluarga umumnya belum diemban oleh usia muda, yang kemungkinan besar masih berada pada tahap pendidikan atau awal karier.

Distribusi ini mencerminkan pola umum struktur keluarga di mana tanggung jawab sebagai kepala keluarga lebih dominan dipegang oleh individu usia produktif hingga menjelang masa pensiun.

4) Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan jenis Kelamin

Tabel 4.15 Jumlah kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	5.982	1.542	7.524
2	TAMBAN	9.325	2.517	11.842
3	ANJIR PASAR	4.993	1.529	6.522
4	ANJIR MUARA	6.348	1.767	8.115
5	ALALAK	17.800	4.347	22.147
6	MANDASTANA	5.095	1.209	6.304
7	RANTAU BADAUH	4.785	1.239	6.024
8	BELAWANG	4.030	1.155	5.185
9	CERBON	2.927	761	3.688
10	BAKUMPAI	3.235	836	4.071
11	KURIPAN	1.811	429	2.240
12	TABUKAN	2.705	716	3.421
13	MEKARSARI	5.157	1.444	6.601
14	BARAMBAI	4.585	1.082	5.667
15	MARABAHAN	6.391	1.687	8.078
16	WANARAYA	4.548	943	5.491
17	JEJANGKIT	1.897	493	2.390
BARITO KUALA		91.614	23.696	115.310

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Data distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan total jumlah penduduk sebanyak 115.310 jiwa, terdiri dari 91.614 laki-laki dan 23.696 perempuan. Dari 17 kecamatan yang ada, Kecamatan Alalak menempati urutan tertinggi dengan jumlah penduduk mencapai 22.147 jiwa, disusul oleh Kecamatan Tamban (11.842 jiwa) dan Anjir Muara (8.115 jiwa). Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kuripan dengan total 2.240 jiwa.

Secara umum, setiap kecamatan menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat konsisten di seluruh wilayah, dengan perbandingan yang cukup signifikan di beberapa kecamatan seperti Alalak dan Tamban.

Dominasi jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan besar seperti Alalak dan Tamban menunjukkan bahwa wilayah tersebut mungkin menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemukiman padat, atau memiliki akses infrastruktur yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk lebih kecil cenderung merupakan wilayah pedesaan atau kurang berkembang secara populasi.

Distribusi ini memberikan gambaran penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, serta pengambilan kebijakan daerah yang berorientasi pada kebutuhan penduduk di masing-masing wilayah kecamatan.

5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status perkawinan di Kabupaten Barito Kuala dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh seorang yang belum menikah maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati. Banyaknya angka perceraian baik termasuk kedalam kategori cerai hidup ataupun cerai mati menjadi faktor utama mengapa jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tergolong cukup banyak di Kabupaten Barito Kuala.

Data lengkap Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin terlampir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.16 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin

NO	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM KAWIN	3.876	1.673	5.549
2	KAWIN	81.736	4.259	85.995
3	CERAI HIDUP	2.608	3.774	6.382
4	CERAI MATI	3.394	13.990	17.384
JUMLAH		91.614	23.696	115.310

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data kepala keluarga menurut status perkawinan, tercatat total 115.310 kepala keluarga, yang terdiri dari 91.614 laki-laki dan 23.696 perempuan. Mayoritas kepala keluarga berada dalam status kawin, dengan jumlah sebesar 85.995 jiwa (sekitar 74,58 % dari total), didominasi oleh laki-laki sebanyak 81.736 jiwa. Hal ini mencerminkan bahwa peran kepala keluarga masih banyak diemban oleh laki-laki dalam konteks rumah tangga yang utuh atau masih menikah.

Status belum kawin hanya mencakup 5.041 kepala keluarga (4,81 %), dan menunjukkan bahwa ada sebagian individu lajang yang menjadi kepala keluarga, baik karena tanggung jawab keluarga besar maupun alasan lain.

Sementara itu, kelompok cerai hidup berjumlah 6.382 jiwa (5,53%), dengan jumlah perempuan lebih tinggi (3.774) dibanding laki-laki (2.608), menunjukkan kemungkinan bahwa perempuan lebih banyak mengambil peran kepala keluarga setelah perceraian.

Yang cukup signifikan adalah kelompok cerai mati sebanyak 17.384 kepala keluarga (15,08%), di mana perempuan mendominasi dengan jumlah 13.990, yang menandakan banyak janda yang menjadi kepala keluarga setelah ditinggal pasangan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika peran kepala keluarga di Barito Kuala yang masih sangat didominasi oleh laki-laki (79,45%), namun menunjukkan peran signifikan perempuan terutama dalam situasi pasca-perkawinan seperti cerai atau ditinggal mati.

6) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia, serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seorang kepala keluarga diharapkan semakintinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Tingginya Pendidikan seseorang pun akan menjadi indikator suatu daerah memiliki Indeks Pembangunan yang Baik. Tentunya peningkatan kualitas Pendidikan pun harus dibarengi dengan terbukannya lapangan pekerjaan yang luas, sehingga nantinya tidak ada permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Data Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan terlampir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.17 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1.346	1.507	2.853
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	3.927	2.659	6.586
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	37.010	12.753	49.763
4	SLTP/SEDERAJAT	18.930	3.201	22.131
5	SLTA/SEDERAJAT	23.308	2.556	25.864
6	DIPLOMA I/II	325	76	401
7	DIPLOMA III/SARJANA MUDA	964	131	1.095
8	DIPLOMA IV/STRATA I	5.389	772	6.161
9	STRATA II	402	40	442
10	STRATA III	13	1	14
JUMLAH		91.614	23.696	115.310

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Distribusi kepala keluarga menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa mayoritas masih memiliki tingkat pendidikan dasar. Dari total 115.310 kepala keluarga, sebanyak 49.763 jiwa (43,16%) tercatat sebagai tamat SD atau sederajat, menjadikannya kelompok pendidikan terbanyak. Kelompok berikutnya adalah lulusan SLTA/sederajat sebanyak 25.864 jiwa (22,43%) dan SLTP/sederajat sebanyak 22.131 jiwa (19,19%).

Jika dikategorikan, sekitar 92,96 % kepala keluarga memiliki tingkat pendidikan dari tamat SD hingga SLTA, yang menunjukkan bahwa pendidikan dasar hingga menengah adalah yang paling umum di wilayah ini.

Sementara itu, kepala keluarga yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma hingga Strata III) berjumlah relatif kecil, yakni hanya sekitar 8.113 jiwa (7,04%), dengan rincian terbanyak pada jenjang Strata I (6.161jiwa). Hal ini mengindikasikan bahwa akses atau kesempatan pendidikan tinggi masih terbatas bagi sebagian besar masyarakat.

Dari sisi gender, jumlah kepala keluarga laki-laki jauh lebih banyak pada semua jenjang pendidikan dibandingkan perempuan, mencerminkan dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga secara keseluruhan.

Menariknya, terdapat juga 2.853 kepala keluarga (2,47%) yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap peningkatan pendidikan dasar dan literasi di beberapa segmen masyarakat.

Secara keseluruhan, data ini menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan strategi pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.

7) Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status Pekerjaan

Tabel 4.18 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan status Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	981	900	1.881
2	APARATUR/PEJABAT NEGARA	3645	418	4.063
3	TENAGA PENGAJAR	575	124	699
4	WIRASWASTA	46704	2714	49.418
5	PERTANIAN/PETERNAKAN	37.489	9053	46.542
6	NELAYAN	401	14	415
7	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	37	1	38
8	PELAJAR/MAHASISWA	601	325	926
9	TENAGA KESEHATAN	85	23	108
10	PENSIUNAN	1026	204	1230
11	LAINNYA	70	9920	9990
JUMLAH		91.614	23.696	115.310

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas, jumlah total kepala keluarga tercatat sebanyak 115.310 jiwa, yang terdiri dari 91.614 laki-laki dan 23.696 perempuan. Data ini menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka tekuni, serta memperlihatkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai kepala keluarga. Sebagian besar kepala keluarga di wilayah ini bekerja di sektor pertanian, wirausaha, dan swasta. Perempuan sebagai kepala keluarga lebih dominan dalam pekerjaan domestik dan profesi pendukung. Profesi formal dan profesional hadir meski tidak mendominasi, mencerminkan beragam latar belakang ekonomi masyarakat. Tingginya jumlah kepala keluarga yang bekerja sendiri (wirausaha/petani) menunjukkan kemandirian ekonomi berbasis lokal.

d) Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Penduduk adalah pengklasifikasian penduduk atas dasar barometer dan tujuan tertentu, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan yang sangat penting guna menentukan kebijakan kependudukan kabupaten Barito Kuala di masa yang akan datang.

1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Setiap penduduk berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan diharapkan untuk selalu berkembang

serta terus menjadi pembelajar. Pendidikan sangatlah penting untuk suatu daerah sebagai dasar dari pembangunan daerah tersebut. Tingkat Pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih ditambah dengan etos kerja dan keterampilan. Berikut data penduduk Kabupaten Barito Kuala berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.19
Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan yang di tamatkan Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	28.781	50,77	27.905	49,23	56.686
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	21.497	50,25	21.281	49,75	42.778
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	47.318	48,88	49.486	51,12	96.804
4	SLTP/SEDERAJAT	30.557	50,25	30.257	49,75	60.814
5	SLTA/SEDERAJAT	33.440	55,88	26.400	44,12	59.840
6	DIPLOMA I/II	341	46,02	400	53,98	741
7	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	1.147	42,75	1.536	57,25	2.683
8	DIPLOMA IV/STRATA I	6.121	43,99	7.793	56,01	13.914
9	STRATA-II	422	62,24	256	37,76	678
10	STRATA-III	15	75,00	5	25,00	20

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Barito Kuala menyelesaikan pendidikan pada tingkat dasar. Dari seluruh jenjang pendidikan, lulusan SD/ sederajat menjadi yang terbanyak, yaitu 96.804 jiwa, atau sekitar 28,90% dari total data. Komposisi gender pada kelompok ini cukup berimbang, dengan perempuan sedikit lebih banyak (51,12%) dibanding laki-laki (48,88%).

Kelompok pendidikan terbanyak berikutnya adalah SLTP/ sederajat sebanyak 60.814 jiwa dan SLTA/ sederajat sebanyak 59.840 jiwa, yang masing-masing menunjukkan masih adanya tantangan dalam akses dan penyelesaian pendidikan dasar, terutama bagi kelompok usia yang lebih tua atau rentan.

Tidak / blm sekolah menempati urutan keempat terbanyak, dengan 56.686 jiwa, di mana laki-laki mendominasi (50,77%). Namun ketika masuk jenjang pendidikan tinggi, komposisi ini mulai berbalik. Lulusan Diploma I/II hingga Strata I didominasi oleh perempuan. Contohnya, lulusan Strata I (S1) mencapai 13.914 jiwa, dengan 56,01 % perempuan, dan lulusan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 2.683 jiwa, juga didominasi perempuan (57,25%).

Pada jenjang Strata II dan III, meskipun jumlahnya masih kecil, tren kembali berpihak kepada laki-laki, terutama di Strata III, di mana dari 20 lulusan, 75 % adalah laki-laki

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa Mayoritas penduduk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD dan SLTP, Masih terdapat jumlah signifikan penduduk yang belum atau tidak bersekolah, Perempuan mulai mendominasi pada jenjang pendidikan tinggi non-strata dan strata satu, Perlu upaya lanjutan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan tinggi, terutama bagi kelompok yang belum sempat menyelesaikan pendidikan dasar.

2) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan informasi jumlah penduduk beserta agama yang diantaranya di Kabupaten Barito Kuala, diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana dan peribadahan serta merencanakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama

Tabel 4.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2025

NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU	KEPERCAYAAN LAINNYA
1	TABUNGANEN	21.267	3	0	0	0	0	0
2	TAMBAN	33.497	7	4	3	2	0	0
3	ANJIR PASAR	18.219	6	4	0	0	0	0
4	ANJIR MUARA	23.611	13	28	0	0	0	0
5	ALALAK	66.991	701	206	50	52	0	0
6	MANDASTANA	18.542	45	8	0	0	0	0
7	RANTAU BADAUH	17.332	22	16	0	0	0	0
8	BELAWANG	14.598	18	11	0	0	0	0
9	CERBON	10.250	55	178	0	0	0	0
10	BAKUMPAI	11.235	111	102	4	0	0	0
11	KURIPAN	6.105	48	36	0	0	0	0
12	TABUKAN	9.729	0	0	0	0	0	0
13	MEKARSARI	19.069	1	0	0	0	0	0
14	BARAMBAI	15.821	117	4	747	0	0	0
15	MARABAHAN	23.363	88	68	32	0	0	0
16	WANARAYA	14.812	88	4	636	0	0	0
17	JEJANGKIT	6.958	24	17	0	0	0	0
	BARITO KUALA	331.399	1.347	686	1.472	54	0	0

Sumber :DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Data menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 didominasi oleh pemeluk agama Islam, dengan jumlah mencapai 331.399 jiwa, yang merupakan sekitar 98,94% dari total penduduk. Ini mencerminkan karakteristik demografis wilayah yang sangat homogen secara keagamaan, khususnya dalam konteks mayoritas Muslim.

Di luar agama Islam, jumlah penganut agama lain terpantau sangat kecil secara persentase, namun tetap menunjukkan adanya keberagaman. Agama Kristen dan Katolik masing-masing memiliki 1.347 dan 686 jiwa, tersebar di beberapa kecamatan seperti Alalak, Bakumpai, Kuripan, dan Cerbon. Sementara itu, penganut agama Hindu berjumlah 1.427 jiwa, dengan konsentrasi signifikan di Kecamatan Barambai (747 jiwa)

dan Wanaraya (636 jiwa), menandakan adanya komunitas Hindu yang relatif stabil di daerah tersebut. Agama Budha hanya dianut oleh 54 jiwa, dan tidak ditemukan data penganut agama Khonghucu maupun kepercayaan lainnya dalam data tahun ini, menunjukkan tingkat keberagaman kepercayaan yang sangat kecil secara kuantitatif.

Kecamatan Alalak menjadi wilayah dengan keberagaman agama paling tinggi, dengan penduduk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha yang semuanya tercatat. Hal ini bisa mengindikasikan keberadaan pusat kota atau daerah pemukiman campuran yang lebih terbuka dan beragam secara sosial budaya.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan dominasi Islam sebagai agama mayoritas di Barito Kuala, namun juga penting dicatat adanya minoritas keagamaan yang memerlukan pengakuan dan perlindungan dalam konteks sosial dan kebijakan publik

3) Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Informasi jumlah disabilitas terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Tabel 4.21
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Disabilitas Perkecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	DISABILITAS FISIK	DISABILITAS NETRA/BUTA	DISABILITAS RUNGU/WICARA	DISABILITAS MENTAL/JIWA	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	DISABILITAS LAINNYA
1	TABUNGANEN	24	8	21	50	1	1
2	TAMBAN	24	10	22	83	11	12
3	ANJIR PASAR	24	3	4	40	1	2
4	ANJIR MUARA	4	1	6	47	10	4
5	ALALAK	28	6	34	101	11	19
6	MANDASTANA	23	4	9	29	4	11
7	RANTAU BADAUH	1	3	6	28	0	0
8	BELAWANG	3	2	6	15	2	6
9	CERBON	3	4	3	7	2	1
10	BAKUMPAI	2	0	1	8	2	0
11	KURIPAN	0	0	1	3	0	0
12	TABUKAN	2	0	3	3	1	1
13	MEKARSARI	25	5	9	67	2	8
14	BARAMBAI	16	2	7	33	7	12
15	MARABAHAN	23	1	15	34	9	4
16	WANARAYA	3	1	6	17	0	4
17	JEJANGKIT	2	0	3	3	1	1
BARITO KUALA		207	50	156	568	64	86

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada tabel 4.21, jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 1.131 jiwa yang tersebar di berbagai jenis disabilitas dan 17 kecamatan. Jenis disabilitas dengan jumlah tertinggi adalah disabilitas mental/jiwa, yaitu sebanyak 568 jiwa (50,22%), yang menjadi perhatian khusus karena mencerminkan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa dan dukungan sosial.

Kecamatan Alalak memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi secara keseluruhan, yaitu dengan total 199 jiwa, termasuk angka tertinggi untuk disabilitas mental (101 jiwa), disabilitas tuna rungu/wicara (34 jiwa), serta disabilitas lainnya (64 jiwa). Ini menunjukkan bahwa Alalak, sebagai wilayah dengan populasi besar dan heterogen, memerlukan perhatian lebih dalam pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kecamatan lain yang juga memiliki jumlah disabilitas cukup tinggi adalah Tamban (162 jiwa) dan Mekarsari (116 jiwa), sementara kecamatan dengan angka terendah adalah Kuripan, dengan hanya 4 jiwa yang tercatat sebagai penyandang disabilitas.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan pemerataan pelayanan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk akses kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dukungan lintas sektor menjadi penting untuk mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang inklusif dan ramah disabilitas.

e) Kelahiran

1) Jumlah Kelahiran

Tabel 4.22

Jumlah Kelahiran berdasarkan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN
1	TABUNGANEN	175
2	TAMBAN	247
3	ANJIR PASAR	154
4	ANJIR MUARA	182
5	ALALAK	630
6	MANDASTANA	184
7	RANTAU BADAUH	125
8	BELAWANG	112
9	CERBON	69
10	BAKUMPAI	98
11	KURIPAN	53
12	TABUKAN	81
13	MEKARSARI	154
14	BARAMBAI	110
15	MARABAHAN	217
16	WANARAYA	141
17	JEJANGKIT	62
BARITO KUALA		2.794

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Jumlah kelahiran di Kabupaten Barito Kuala selama periode terakhir tercatat sebanyak 2.794 kelahiran yang tersebar di 17 kecamatan. Angka ini mencerminkan dinamika demografis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, terutama di bidang kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta pelayanan dasar.

Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Alalak mencatat jumlah kelahiran tertinggi dengan 630 kelahiran, disusul oleh Kecamatan Tamban (247 kelahiran) dan Marabahan (217). Sementara itu, jumlah kelahiran terendah tercatat di Kecamatan Kuripan kelahiran dengan hanya 53 kelahiran, diikuti oleh Jejangkit (62 kelahiran) dan Cerbon (69 kelahiran).

Sebaran angka kelahiran ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antarwilayah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan tingkat urbanisasi. Kecamatan-kecamatan dengan jumlah kelahiran tinggi umumnya merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang padat dan akses transportasi yang lebih baik, sehingga pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau.

Data ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan strategis dalam mendukung program kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan populasi, terutama dalam menjamin ketersediaan layanan dasar yang merata dan berkeadilan.

2) Angka Kelahiran Kasar

Tabel 4.23 Angka Kelahiran kasar tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN 2025	CBR
1	TABUNGANEN	175	21.206	8,25
2	TAMBAN	247	33.384	7,4
3	ANJIR PASAR	154	18.110	8,5
4	ANJIR MUARA	182	23.586	7,72
5	ALALAK	630	66.578	9,46
6	MANDASTANA	184	18.532	9,93
7	RANTAU BADAUH	125	17.323	7,22
8	BELAWANG	112	14.575	7,68
9	CERBON	69	10.409	6,63
10	BAKUMPAI	98	11.372	8,62
11	KURIPAN	53	6.182	8,57
12	TABUKAN	81	9.683	8,37
13	MEKARSARI	154	18.984	8,11
14	BARAMBAI	110	16.595	6,63
15	MARABAHAN	217	23.351	9,29
16	WANARAYA	141	15.392	9,16
17	JEJANGKIT	62	6.916	8,96
BARITO KUALA		2.794	332.178	8,41

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas, Kabupaten Barito Kuala mencatat 2.794 kelahiran dari total penduduk sebanyak 332.178 jiwa di pertengahan tahun. Berdasarkan data ini, angka Crude Birth Rate (CBR) — yaitu jumlah kelahiran per 1.000 penduduk — berada pada angka 8,41, yang menunjukkan bahwa dari setiap 1.000 penduduk, terdapat sekitar 8 bayi lahir dalam setahun. Kecamatan Mandastana mencatat CBR tertinggi sebesar 9,93, dengan 184 kelahiran dari populasi 18.532 jiwa. Tingginya CBR di kecamatan-kecamatan tersebut mencerminkan tingginya dinamika kelahiran terhadap total penduduk dan bisa berkaitan dengan struktur usia muda yang dominan atau tingkat adopsi program keluarga berencana yang masih rendah.

f) Kematian

1) Jumlah Kematian

Tabel 4.24

Jumlah Kematian berdasarkan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2025

NO	KECAMATAN	PENERBITAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2025	JUMLAH KEMATIAN TAHUN 2025
1	TABUNGANEN	126	127
2	TAMBAN	167	180
3	ANJIR PASAR	116	116
4	ANJIR MUARA	222	225
5	ALALAK	383	381
6	MANDASTANA	139	139
7	RANTAU BADAUH	226	226
8	BELAWANG	89	90
9	CERBON	79	80
10	BAKUMPAI	70	71
11	KURIPAN	56	56
12	TABUKAN	40	40
13	MEKARSARI	106	107
14	BARAMBAI	97	97
15	MARABAHAN	141	142
16	WANARAYA	69	69
17	JEJANGKIT	62	63
BARITO KUALA		2.188	2.209

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa angka kematian berdasarkan penerbitan akta kematian berjumlah 2.188 jiwa, yang tersebar dalam 17 kecamatan. Kecamatan alalak merupakan kecamatan tertinggi angka kematian yang diterbitkan Akta Kematian yaitu 383 jiwa, sedangkan Kecamatan Tabukan merupakan kecamatan terendah dengan jumlah 40 jiwa.

2) Angka Kematian Kasar

Tabel 4.25 Angka Kematian Kasar tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN 2025	ANGKA KEMATI AN KASAR
1	TABUNGANEN	126	21.206	5,94
2	TAMBAN	180	33.384	5,39
3	ANJIR PASAR	116	18.110	6,41
4	ANJIR MUARA	225	23.586	9,54
5	ALALAK	381	66.578	5,72
6	MANDASTANA	139	18.532	7,5
7	RANTAU BADAUH	226	17.323	13,05
8	BELAWANG	90	14.575	6,17
9	CERBON	80	10.409	7,69
10	BAKUMPAI	71	11.372	6,24
11	KURIPAN	56	6.182	9,06
12	TABUKAN	40	9.683	4,13
13	MEKARSARI	107	18.984	5,64
14	BARAMBAI	97	16.595	5,85
15	MARABAHAN	142	23.351	6,08
16	WANARAYA	69	15.392	4,48
17	JEJANGKIT	63	6.916	9,11
BARITO KUALA		2.208	332.178	6,65

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada tahun 2025, Kabupaten Barito Kuala mencatat 2.208 kematian dari total penduduk sebanyak 332.178 jiwa di pertengahan tahun. Dengan demikian, angka Crude Death Rate (CDR) atau angka kematian kasar berada pada 6,65 per 1.000 penduduk. Artinya, dari setiap 1.000 orang penduduk, rata-rata terdapat hampir 7 kematian dalam setahun. Kecamatan dengan CDR Tertinggi Rantau Badauh mencatat angka kematian tertinggi dengan CDR sebesar 13,05, hasil dari 226 kematian dengan populasi 17.323 jiwa. Kecamatan lainnya dengan CDR tinggi: Anjir Muara (9,54), Jejangkit (9,11), Kuripan (9,06), Cerbon (7,69), Mandastana (7,50). Tingginya angka kematian di kecamatan-kecamatan tersebut dapat mencerminkan beberapa kemungkinan, seperti: Tingginya proporsi penduduk lansia, Akses terhadap layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Perbedaan angka kematian antar kecamatan menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan berbasis wilayah, seperti peningkatan layanan kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, serta intervensi terhadap kelompok rentan.

B. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk Kabupaten Barito Kuala akan menentukan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barito Kuala di masa depan. Menjadi syarat mutlak yaitu kualitas penduduk ditunjang dengan pengembangan sumber daya manusia baik bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kuantitas penduduk yang besar apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik, maka tidak akan menjadi kekuatan namun justru akan menjadi beban di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

1. Kesehatan

Data kependudukan menjadi sangat penting bagi pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data penduduk untuk bisa menerima pelayanan publik berupa akses kesehatan, data kependudukan menjadi mutlak sifatnya sebagai pintu gerbang masyarakat menerima pelayanan kesehatan bahkan melakukan pendataan kematian. Data yang akurat dan berkualitas diperlukan untuk berbagai keperluan pelayanan, pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan lain-lain. Data kependudukan erat kaitannya dengan bidang kesehatan terutama di Puskesmas dalam memetakan penyakit dalam suatu wilayah, perekapan data penyakit, bahkan bagi masyarakat mengurus kematian (mendapatkan Bantuan/santunan kematian).

a) Kelahiran

1) Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*)

Angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi (15 - 49 tahun) di Kabupaten Barito Kuala dalam suatu periode tertentu.

Rumusnya :

$$GFR = \frac{B}{W_{15-49}} \times k$$

Keterangan:

B = Jumlah Kelahiran

Pf (15-49) = Jumlah Wanita umur 15 – 49 Tahun

K = 1000

GFR Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025 adalah :

$$\frac{2.794}{88.875} \times 1000 = 31,44$$

Angka ini menunjukkan bahwa dari 1000 wanita usia 15 - 49 tahun terdapat 31-32 kelahiran.

Berikut data angka kelahiran umum di Kabupaten Barito Kuala :

Tabel 4.26 Angka Kelahiran Umum Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PEREMPUAN USIA 15- 49 TAHUN	GFR
1	TABUNGANEN	175	5.734	30,52
2	TAMBAN	247	8.717	28,34
3	ANJIR PASAR	154	4.630	33,26
4	ANJIR MUARA	182	6.279	28,99
5	ALALAK	630	18.742	33,61
6	MANDASTANA	184	4.979	36,96
7	RANTAU BADAUH	125	4.533	27,58
8	BELAWANG	112	3.742	29,93
9	CERBON	69	2.759	25,01
10	BAKUMPAI	98	3.141	31,2
11	KURIPAN	53	1.678	31,59
12	TABUKAN	81	2.572	31,49
13	MEKARSARI	154	4.844	31,79
14	BARAMBAI	110	4.327	25,42
15	MARABAHAN	217	6.390	33,96
16	WANARAYA	141	3.954	35,66
17	JEJANGKIT	62	1.854	33,44
BARITO KUALA		2.794	88.875	31,44

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada tabel 4.22, jumlah kelahiran yang tercatat di Kabupaten Barito Kuala mencapai 2.794 kelahiran, dengan jumlah perempuan usia subur (15–49 tahun) sebanyak 88.875 orang. Hal ini menghasilkan Gross Fertility Rate (GFR) sebesar 31,44, yang menunjukkan bahwa untuk setiap 1.000 perempuan usia subur, terdapat sekitar 31 kelahiran. Kecamatan Mandastana mencatat GFR tertinggi, yaitu 36,96, dari total 184 kelahiran dan 4.979 perempuan usia subur. Kecamatan dengan GFR tinggi lainnya meliputi Wanaraya (35,66), Marabahan (33,96), Alalak (33,61), Jejangkit (33,44), tingginya GFR di wilayah-wilayah ini mengindikasikan angka kelahiran relatif tinggi dan kemungkinan adanya preferensi terhadap keluarga besar atau keterbatasan akses terhadap program keluarga berencana. Kecamatan dengan GFR Terendah Cerbon, yaitu 25,01, dengan 69 kelahiran dari 2.759 perempuan usia subur. Hal ini dapat mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran atau perubahan pola pikir masyarakat terhadap jumlah anak ideal. Perbedaan GFR antar kecamatan menunjukkan adanya variasi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pola kelahiran di masyarakat.

2) Rasio Ibu dan Anak Perempuan

Tabel 4.27 Rasio Ibu dan Anak Perempuan

NO	KECAMATAN	PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	UMUR ANAK	CWR
1	TABUNGANEN	5.734	1.338	23,33
2	TAMBAN	8.717	1.870	21,45
3	ANJIR PASAR	4.630	1.065	23,00
4	ANJIR MUARA	6.279	1.427	22,73
5	ALALAK	18.742	4.465	23,82
6	MANDASTANA	4.979	1.200	24,10
7	RANTAU BADAUH	4.533	1.015	22,39
8	BELAWANG	3.742	873	23,33
9	CERBON	2.759	575	20,84
10	BAKUMPAI	3.141	760	24,20
11	KURIPAN	1.678	396	23,60
12	TABUKAN	2.572	635	24,69
13	MEKARSARI	4.844	1.144	23,62
14	BARAMBAI	4.327	979	22,63
15	MARABAHAN	6.390	1.487	23,27
16	WANARAYA	3.954	940	23,77
17	JEJANGKIT	1.854	438	23,62
BARITO KUALA		88.875	20.607	23,19

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Pada tabel di atas dilihat ada 20.607 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kabupaen Barito Kuala sedangkan jumlah perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 88.875 jiwa sehingga dapat memperlihatkan bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 23 anak balita.

b) Kematian

Kematian atau mortalitas sangat mempengaruhi jumlah struktur dan komposisi penduduk. Pengaruh kematian adalah mengurangi jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Kematian dapat terjadi pada penduduk laki-laki, perempuan, usia bayi, usia anak, usiaremaja, usia dewasa maupun usia tua. Besar kecilnya kematian menurut karakteristik tersebut berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan perubahan struktur umur dan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah. Kasus kematian dalam jumlah yang besar menjadi suatu masalah yang dapat berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, adat istiadat maupun kondisi kesehatan lingkungan. Peristiwa kematian terjadi secara mendadak karena insiden kecelakaan maupun melalui serangkaian peristiwa mengalami sakit. Saat ini cukup banyak dan beragam jenis penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Banyak kematian terjadi kepada penduduk usia muda dan dewasa dikarenakan kecelakaan, atau terkena penyakit menular. Sementara itu, kasus kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit akibat infeksi kuman. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Mortalitas menjadi penting dan diperlukan untuk mengevaluasi program pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala. Parameter mortalitas yang sering digunakan adalah angka yang menyatakan banyaknya peristiwa kematian menurut karakteristik tertentu dari jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu

\

1) Kematian Bayi dan Balita

Tabel 4.28 Angka Kematian berdasarkan Kasus Kematian Bayi dan Balita

NO	KECAMATAN	KEMATIAN BAYI	KEMATIAN BALITA
1	TABUNGANEN	0	0
2	TAMBAN	2	0
3	ANJIR PASAR	1	0
4	ANJIR MUARA	2	0
5	ALALAK	6	0
6	MANDASTANA	1	0
7	RANTAU BADAUH	4	0
8	BELAWANG	1	0
9	CERBON	0	0
10	BAKUMPAI	2	0
11	KURIPAN	0	0
12	TABUKAN	4	0
13	MEKARSARI	3	2
14	BARAMBAI	3	0
15	MARABAHAN	1	0
16	WANARAYA	5	0
17	JEJANGKIT	0	0
JUMLAH		35	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Sepanjang tahun 2025, jumlah kematian bayi (usia di bawah 1 tahun) di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 35 kasus, sedangkan kematian balita (usia 1–4 tahun) tercatat hanya 2 kasus. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pada anak usia dini terjadi pada masa bayi. Kecamatan dengan angka kematian bayi tertinggi adalah: Alalak (6 kasus), Wanaraya (5 kasus), Rantau Badauh (4 kasus) dan Tabukan (4 kasus) Disusul oleh Mekarsari (3 kasus) dan Barambai (3 kasus) , Tamban, Anjir Muara, Bakumpai masing -masing 2 kasus, Sementara kecamatan lainnya mencatat 1 atau tidak ada kasus. Dua kematian balita terjadi di Kecamatan Mekarsari. Alalak sebagai wilayah dengan beban kematian anak usia dini tertinggi secara absolut, yaitu 6 kasus (6 bayi) Kecamatan Tanpa Kematian Bayi dan Balita Sebanyak 7 kecamatan tidak melaporkan adanya kematian bayi maupun balita, yaitu: Tabunganen, Cerbon,Kuripan dn Jejangkit. Hal ini bisa mencerminkan bahwa Perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan anak, Akses lebih baik terhadap imunisasi dan peningkatan kesadaran gizi serta

perawatan neonatal Rendahnya kematian balita (1 kasus) merupakan indikator positif, namun tetap perlu perhatian berkelanjutan terhadap upaya preventif seperti perawatan kehamilan, persalinan aman, ASI eksklusif, serta gizi seimbang

1) Kematian Ibu

Tabel 4.29

Angka Kematian Ibu berdasarkan kasus Kematian Ibu tahun 2025

NO	KECAMATAN	KEMATIAN IBU
1	TABUNGANEN	0
2	TAMBAN	1
3	ANJIR PASAR	0
4	ANJIR MUARA	0
5	ALALAK	1
6	MANDASTANA	1
7	RANTAU BADAUH	0
8	BELAWANG	1
9	CERBON	0
10	BAKUMPAI	0
11	KURIPAN	0
12	TABUKAN	0
13	MEKARSARI	1
14	BARAMBAI	0
15	MARABAHAN	0
16	WANARAYA	0
17	JEJANGKIT	0
JUMLAH		5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

pada tahun 2025, jumlah kematian ibu di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 5 kasus. Kematian ibu ini merujuk pada kematian perempuan saat hamil, melahirkan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah persalinan), yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan kesehatan ibu dan sistem pelayanan kebidanan di suatu wilayah. Distribusi Kematian Ibu per Kecamatan Dari total 17 kecamatan di Barito Kuala, hanya lima kecamatan yang melaporkan adanya kasus kematian ibu, yaitu: Tamban: 1 kasus , Alalak: 1 kasus, Mandastana: 1 kasus, Belawang: 1 kasus, Mekarsari: 1 kasus. Sementara 13 kecamatan lainnya tidak mencatat adanya kematian ibu selama

tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Barito Kuala sudah relatif aman dari risiko kematian ibu, meskipun kasus yang terjadi di beberapa kecamatan tetap memerlukan perhatian khusus. Upaya pencegahan melalui penguatan layanan kesehatan ibu hamil dan bersalin, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta pemantauan kondisi kehamilan secara rutin sangat penting untuk menekan angka kematian ibu di tahun-tahun mendatang.

2. Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah presentasi penduduk umur 15 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengikuti kalimat sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Angka Melek huruf (AMH) berguna untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf dan menunjukkan kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menunjukkan pula kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media, sehingga Angka Melek Huruf (AMH) ini dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap perkembangan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan capaian yang cukup tinggi, yakni sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa semua penduduk di wilayah ini telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis, yang merupakan fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Capaian 100% menunjukkan keberhasilan program pendidikan dasar dan pemberantasan buta huruf yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun, penduduk yang belum melek huruf masih perlu mendapatkan perhatian, baik melalui program pendidikan nonformal seperti Kejar Paket A/B, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis literasi di tingkat desa. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menjangkau kelompok usia dewasa yang belum tersentuh pendidikan formal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemampuan baca-tulis dalam kehidupan sehari-hari.

b) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai pada wilayah tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

Tabel 4.30 Capaian Angka Partisipasi Kasar

No	Indikator	Capaian (%)
1	PAUD/Sederajat	104,96
2	SD/Sederajat	102,02
3	SMP/Sederajat	100,03
4	Non Formal/ Kesetaraan	88,27

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Dari data tersebut tampak Capaian indikator pendidikan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagian besar jenjang pendidikan dasar dan menengah telah melampaui target 100%, yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Berikut rincian capaian menurut masing-masing indikator :

- PAUD/Sederajat mencapai 104,96%, menandakan bahwa partisipasi anak usia dini dalam pendidikan sangat tinggi, bahkan melebihi jumlah populasi sasaran, kemungkinan karena inklusi anak usia di bawah maupun di atas kelompok usia standar PAUD.
- SD/Sederajat mencatat capaian sebesar 102,02%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah terlayani, termasuk beberapa peserta didik yang mungkin berasal dari luar daerah.
- SMP/Sederajat mencapai 100,03%, menandakan bahwa partisipasi pendidikan menengah pertama juga sangat baik dan melampaui target.

- iv. Pendidikan Non Formal/Kesetaraan memiliki capaian 88,27%. Meskipun belum mencapai 100%, angka ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam menjangkau kelompok yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, seperti program Paket A, B, dan C.

Secara umum, capaian pendidikan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan telah berhasil, terutama di jalur pendidikan formal. Ke depan, perhatian lebih dapat difokuskan pada :

- i. Peningkatan capaian pendidikan non formal, termasuk peningkatan kualitas, kuantitas tutor, dan sarana pembelajaran.
- ii. Pemerataan akses dan mutu pendidikan hingga ke daerah terpencil dan kelompok rentan.
- iii. Pemeliharaan kualitas layanan PAUD, agar tidak hanya kuantitas tetapi juga mutu pendidikan anak usia dini terus meningkat.

c) Angka Partisipasi Murni

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100% karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan. Berikut Capaian Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Tabel 4.31 Capaian Angka Partisipasi Murni

No	Indikator	Capaian angka partisipasi murni (%)
1	PAUD/Sederajat	90,23
2	SD/Sederajat	94,32
3	SMP/Sederajat	90,02
4	Non Formal/ Kesetaraan	83,82

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Barito Kuala pada tahun ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan nonformal berada dalam kondisi yang cukup baik, dengan beberapa indikator mencapai angka mendekati sempurna.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau sederajat, APM mencapai 90,23%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia dini telah mengikuti layanan pendidikan sesuai usia, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan kognitif, afektif, dan motorik anak.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, APM tercatat sebesar 94,32%, yang berarti hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah bersekolah sesuai kelompok usianya. Ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjamin akses pendidikan dasar secara menyeluruh.

Selanjutnya, APM pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat mencapai 90,02%. Meski sedikit lebih rendah dari jenjang SD, angka ini masih tergolong tinggi dan menandakan bahwa sebagian besar anak usia 13–15 tahun telah melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama.

Sementara itu, untuk jalur nonformal atau kesetaraan, capaian APM berada di angka 83,82%. Angka ini cukup menggembirakan, karena mencerminkan adanya alternatif pendidikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses jalur formal karena berbagai kendala.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala telah menunjukkan performa yang baik dalam hal pemerataan pendidikan, terutama dalam menjangkau kelompok usia sekolah secara tepat sasaran. Meski demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan APM, khususnya pada jalur nonformal, serta mempertahankan dan meningkatkan capaian di jenjang lainnya.

d) Angka Putus Sekolah

Pada tahun 2025, angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 0,14 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 anak usia sekolah dasar, terdapat kurang dari satu anak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga tamat.

Capaian ini mencerminkan upaya positif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dasar. Angka putus sekolah yang relatif rendah ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan retensi peserta didik di jenjang pendidikan dasar.

Meski demikian, angka 0,14 persen tetap perlu menjadi perhatian, karena setiap anak yang putus sekolah memiliki potensi kehilangan hak atas pendidikan yang berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat preventif dan responsif, seperti identifikasi dini siswa berisiko putus sekolah, pendampingan sosial, dan pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, perlu terus diperkuat.

Dengan menjaga angka putus sekolah tetap rendah dan mendorong partisipasi pendidikan yang tinggi, Kabupaten Barito Kuala akan semakin kokoh dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan sejak dari pendidikan dasar.

3. Ekonomi

a) Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan keseluruhan penduduk yang telah memasuki usia produktif, baik itu yang telah bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau masih

menganggur. sedangkan tenaga kerja merupakan penduduk pada usia produktif yang telah bekerja secara aktif baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun masyarakat.

1) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15–64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu, juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 4.32 Jumlah Usia Kerja Menurut Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	USIA KERJA	JUMLAH PENDUDUK	%
1	TABUNGANEN	15.110	21.270	71,04
2	TAMBAN	23.989	33.513	71,58
3	ANJIR PASAR	12.836	18.229	70,42
4	ANJIR MUARA	16.808	23.652	71,06
5	ALALAK	48.389	68.000	71,16
6	MANDASTANA	12.929	18.595	69,53
7	RANTAU BADAUH	12.267	17.370	70,62
8	BELAWANG	10.346	14.627	70,73
9	CERBON	7.437	10.483	70,94
10	BAKUMPAI	8.257	11.452	72,1
11	KURIPAN	4.497	6.189	72,66
12	TABUKAN	6.748	9.729	69,36
13	MEKARSARI	13.356	19.070	70,04
14	BARAMBAI	11.734	16.689	70,31
15	MARABAHAN	16.748	23.551	71,11
16	WANARAYA	10.602	15.540	68,22
17	JEJANGKIT	4.955	6.999	70,8
BARITO KUALA		237.008	334.958	70,76

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan Tabel diatas, Kabupaten Barito Kuala memiliki jumlah penduduk usia kerja sebanyak 237.008 jiwa dari total 334.958 jiwa, atau setara dengan 70,76% dari total populasi. Distribusi penduduk usia kerja di masing-masing kecamatan juga menunjukkan proporsi yang relatif stabil dengan kisaran 68% hingga 73%. Kecamatan dengan persentase usia kerja tertinggi tercatat di Kuripan 72,66%, Bakumpai 72,01%, Alalak dan Marabahan juga menunjukkan angka tinggi yaitu sekitar 71,16% dan 71,11%. Sedangkan kecamatan dengan proporsi usia kerja terendah adalah Wanaraya 68,22%, Tabukan 69,36%, Mandastana 69,53%

Tingginya proporsi penduduk usia kerja (sekitar 70,76%) menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala berada dalam fase bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif. Ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan produktivitas daerah jika dibarengi dengan :

- Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
- Pembukaan lapangan kerja yang luas
- Peningkatan kualitas SDM, khususnya sektor pertanian, UMKM, dan industri kreatif yang dominan di wilayah ini
- Pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi usia kerja ini dengan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya

Tabel 4.33 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

NO	KECAMATAN	ANGKATAN KERJA			USIA KERJA			ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	6.307	1.212	7.519	7.718	7.392	15.110	81,72	16,40	49,76
2	TAMBAN	9.978	3.997	13.975	12.285	11.704	23.989	81,22	34,15	58,26
3	ANJIR PASAR	5.176	2.456	7.632	6.512	6.324	12.836	79,48	38,84	59,46
4	ANJIR MUARA	7.072	2.679	9.751	8.540	8.268	16.808	82,81	32,40	58,01
5	ALALAK	19.028	6.224	25.252	24.373	24.016	48.389	78,07	25,92	52,19
6	MANDASTANA	5.269	1.675	6.944	6.544	6.385	12.929	80,52	26,23	53,71
7	RANTAU BADAUH	5.072	2.560	7.632	6.200	6.067	12.267	81,81	42,20	62,22
8	BELAWANG	4.466	2.071	6.537	5.292	5.054	10.346	84,39	40,98	63,18
9	CERBON	3.164	1.774	4.938	3.816	3.621	7.437	82,91	48,99	66,40
10	BAKUMPAI	3.636	962	4.598	4.278	3.979	8.257	84,99	24,18	55,69
11	KURIPAN	1.879	428	2.307	2.312	2.185	4.497	81,27	19,59	51,30
12	TABUKAN	2.966	1.519	4.485	3.462	3.286	6.748	85,67	46,23	66,46
13	MEKARSARI	5.671	2.560	8.231	6.864	6.492	13.356	82,62	39,43	61,63
14	BARAMBAI	4.998	3.043	8.041	5.962	5.772	11.734	83,83	52,72	68,53
15	MARABAHAN	6.586	3.611	10.197	8.360	8.388	16.748	78,78	43,05	60,88
16	WANARAYA	4.500	1.625	6.125	5.371	5.231	10.602	83,78	31,06	57,77
17	JEJANGKIT	2.078	760	2.838	2.577	2.378	4.955	80,64	31,96	57,28
BARITO KUALA		97.846	39.156	137.002	120.466	116.542	237.008	81,22	33,60	57,80

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2025, APAK Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan mencapai 57,80%, dengan partisipasi laki-laki sebesar 81,22%, dan perempuan sebesar 33,60%.

Kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar, menunjukkan adanya potensi tenaga kerja perempuan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, kemungkinan karena keterbatasan akses pekerjaan, tanggung jawab domestik, atau budaya setempat. Beberapa kecamatan mencatat partisipasi angkatan kerja tertinggi, yaitu Barambai 68,53%, Tabukan 66,46%, Cerbon 66,40%, Belawang 63,18%, Rantau Badauh 62,22%. Kecamatan-kecamatan ini menunjukkan keterlibatan yang baik dari penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, termasuk kontribusi signifikan dari perempuan (di atas 40% di beberapa kecamatan). Sebaliknya, partisipasi paling rendah tercatat di Tabunganen 49,76%, Kuripan 51,30%, Alalak 52,19%. Angka ini

mengindikasikan perlunya intervensi untuk memperluas akses kerja, pelatihan, atau penyediaan infrastruktur penunjang kerja khususnya di daerah-daerah tersebut.

Penguatan pemberdayaan perempuan, peningkatan akses pelatihan kerja, dan pengembangan UMKM berbasis lokal dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi. Kecamatan dengan angka rendah memerlukan intervensi lebih lanjut melalui program padat karya, inkubasi wirausaha, serta perluasan sektor informal yang produktif.

c) Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 4.34 Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	34.340	29.915	64.255
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	5	62.071	62.076
3	PELAJAR/MAHASISWA	35.777	32.111	67.888
4	PENSIUNAN	1.029	409	1.438
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.540	2.599	5.139
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	208	1	209
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	527	34	561
8	PERDAGANGAN	248	139	387
9	PETANI/PEKEBUN	38.549	21.611	60.160
10	PETERNAK	22	8	30
11	NELAYAN/PERIKANAN	421	20	441
12	INDUSTRI	6	4	10
13	KONSTRUKSI	19	0	19
14	TRANSPORTASI	119	4	123
15	KARYAWAN SWASTA	14.659	4.273	18.932
16	KARYAWAN BUMN	138	37	175
17	KARYAWAN BUMD	75	35	110
18	KARYAWAN HONORER	1.203	1.752	2.955
19	BURUH HARIAN LEPAS	4.193	122	4.315
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.097	409	1.506
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	10	0	10
22	BURUH PETERNAKAN	4	1	5
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	31	32
24	TUKANG CUKUR	17	0	17
25	TUKANG LISTRIK	9	0	9



26	TUKANG BATU	49	0	49
27	TUKANG KAYU	153	1	154
28	TUKANG SOL SEPATU	1	0	1
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	35	0	35
30	TUKANG JAHIT	34	42	76
31	TUKANG GIGI	0	0	0
32	PENATA RIAS	3	8	11
33	PENATA BUSANA	0	1	1
34	PENATA RAMBUT	2	4	6
35	MEKANIK	108	0	108
36	SENIMAN	6	1	7
37	TABIB	1	0	1
38	PARAJI	0	0	0
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	1	1
41	IMAM MASJID	9	0	9
42	PENDETA	9	3	12
43	PASTOR	0	0	0
44	WARTAWAN	14	0	14
45	USTADZ/MUBALIGH	20	3	23
46	JURU MASAK	1	3	4
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	1	0	1
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	1	0	1
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0



61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROP.	0	0	0
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	18	2	20
64	DOSEN	60	52	112
65	GURU	564	1.343	1.907
66	PILOT	0	0	0
67	PENGACARA	6	7	13
68	NOTARIS	2	0	2
69	ARSITEK	2	0	2
70	AKUNTAN	0	0	0
71	KONSULTAN	10	0	10
72	DOKTER	17	29	46
73	BIDAN	0	119	119
74	PERAWAT	74	124	198
75	APOTEKER	6	26	32
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	0	0
79	PELAUT	72	0	72
80	PENELITI	2	1	3
81	SOPIR	252	0	252
82	PIALANG	1	0	1
83	PARANORMAL	1	0	1
84	PEDAGANG	1.378	688	2.066
85	PERANGKAT DESA	316	193	509
86	KEPALA DESA	47	3	50
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0	0
88	WIRASWASTA	31.059	7.012	38.071
89	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	9	1	10
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	1	0	1
94	TENAGA TATA USAHA	1	1	2
95	OPERATOR	2	0	2

96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
97	TEKNISI	1	0	1
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
99	PEKERJAAN LAINNYA	75	65	140
BARITO KUALA		169.639	165.319	334.958

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2025, dari total 334.958 jiwa, terdapat distribusi pekerjaan yang sangat beragam, mencerminkan karakteristik daerah yang dominan dengan aktivitas agraris serta sektor informal. Sebagian besar penduduk masih tergolong belum/tidak bekerja dan belum memasuki dunia kerja, yang meliputi : Belum/Tidak Bekerja: 64.255 jiwa (19,14%), Mengurus Rumah Tangga: 62.076 jiwa (18,53%) – mayoritas perempuan, Pelajar/Mahasiswa: 67.888 jiwa (20,27%). tiga kelompok ini mencakup hampir 58% dari total penduduk, yang menunjukkan beban ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk usia kerja aktif. Sebagaimana karakteristik wilayah perdesaan, sektor pertanian/perkebunan menjadi tulang punggung utama lapangan kerja Petani/Pekebun: 60.160 jiwa (17,96%), Wiraswasta: 38.071 jiwa (11,37%) dan Buruh Harian Lepas : 4.315 jiwa (5,65%) Sektor ini didominasi oleh laki-laki, meskipun peran perempuan cukup signifikan dalam kegiatan wiraswasta dan buruh harian lepas.

4. Sosial

a) Proporsi Penduduk menurut penyandang Disabilitas

Indikator Angka Penduduk Penyandang Cacat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk penyandang disabilitas dengan jumlah penduduk. Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang cacat menurut jenis kecacatannya. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 0,30% dari total populasi. Dengan total jumlah penduduk 329.799 jiwa, maka diperkirakan terdapat sekitar 989 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas di wilayah ini.

Meskipun persentasenya relatif kecil, keberadaan kelompok ini tetap menjadi bagian penting dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal:

- Aksesibilitas terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
- Pemberdayaan ekonomi, melalui pelatihan keterampilan kerja inklusif.
- Perlindungan sosial dan hukum, agar mereka memperoleh hak dan kesempatan yang setara.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat pendataan yang inklusif dan akurat, serta menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan

B. Mobilitas

Mobilitas penduduk yang permanen atau dikenal dengan migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (Migrasi Internal) atau batas politik/negara (Migrasi International) atau dengan cara lain migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*Push Factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*Pull Factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah- daerah lain.

Mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya dorong disebut migrasi keluar, sedangkan mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya tarik disebut migrasi masuk.

1. Migrasi Masuk

Angka Migrasi Masuk (*In Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

$$\begin{aligned} \text{AMM} &= \frac{\text{banyaknya Migran Masuk}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{11.017}{334.958} \times 1000 = 32,89 \end{aligned}$$

Angka migrasi masuk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah 32,89. Hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 33 jiwa.

Berikut data migrasi penduduk masuk ke Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 berdasarkan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4.35 Jumlah Migran Masuk

NO	KECAMATAN	MIGRAN MASUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	162	367	529
2	TAMBAN	163	557	720
3	ANJIR PASAR	100	334	434
4	ANJIR MUARA	186	439	625
5	ALALAK	941	3.109	4.050
6	MANDASTANA	127	374	501
7	RANTAU BADAUH	95	296	391
8	BELAWANG	97	275	372
9	CERBON	78	253	331
10	BAKUMPAI	64	228	292
11	KURIPAN	35	104	139
12	TABUKAN	75	184	259
13	MEKARSARI	127	364	491
14	BARAMBAI	119	320	439
15	MARABAHAN	201	698	899
16	WANARAYA	78	270	348
17	JEJANGKIT	51	146	197
BARITO KUALA		2.699	8.318	11.017

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Barito Kuala mencatat total 11.017 jiwa migran masuk, yang terdiri atas 2.699 laki-laki dan 8.318 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa proporsi migran perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 75,50% dari total migran masuk. Kecamatan dengan jumlah migrasi masuk tertinggi adalah Alalak dengan 4.050 jiwa (941 laki-laki dan 3.109 perempuan), Disusul oleh Marabahan sebanyak 899 jiwa, dan Tamban dengan 720 jiwa. Sementara itu, jumlah migran masuk terendah tercatat di Kecamatan Jejangkit, yaitu sebanyak 139 jiwa. Fenomena migrasi masuk ini dapat mencerminkan Daya tarik ekonomi atau peluang kerja di wilayah tertentu, Perpindahan karena pendidikan atau pernikahan, Serta faktor sosial lainnya seperti akses terhadap layanan kesehatan atau infrastruktur.

Dominasi migran perempuan juga menjadi catatan penting untuk pengambilan kebijakan yang responsif gender, terutama dalam perencanaan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi di tingkat kecamatan.

2. Migrasi Keluar

Angka Migrasi Keluar (*Out Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.

$$\begin{aligned} \text{AMK} &= \frac{\text{banyaknya Migran Keluar}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1.000 \\ &= \frac{11.362}{334.958} \times 1.000 = 33,92 \end{aligned}$$

Angka migrasi keluar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah 33,92 , hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 34 jiwa.

Tabel 4.36 Jumlah Migran Keluar

NO	KECAMATAN	MIGRAN KELUAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	344	306	650
2	TAMBAN	525	549	1.074
3	ANJIR PASAR	265	246	511
4	ANJIR MUARA	413	383	796
5	ALALAK	1.389	1.385	2.774
6	MANDASTANA	352	325	677
7	RANTAU BADAUH	206	257	463
8	BELAWANG	221	220	441
9	CERBON	166	179	345
10	BAKUMPAI	168	167	335
11	KURIPAN	145	114	259
12	TABUKAN	198	162	360
13	MEKARSARI	311	345	656
14	BARAMBAI	237	281	518
16	MARABAHAN	422	406	828
	WANARAYA	197	223	420
17	JEJANGKIT	123	132	255
BARITO KUALA		5.682	5.680	11.362

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Data migrasi keluar Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 menunjukkan bahwa angka migrasi keluar relatif signifikan, dengan total 11.362 orang yang meninggalkan wilayah tersebut. Migrasi ini mencakup 5.682 laki-laki dan 5.680 perempuan, yang menunjukkan distribusi yang hampir seimbang antara jenis kelamin.

Beberapa kecamatan, seperti Alalak, Tamban dan Marabahan memiliki angka migrasi keluar yang sangat tinggi, mencerminkan kemungkinan adanya faktor-faktor yang mendorong penduduk untuk berpindah, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, atau faktor sosial lainnya. Di sisi lain, kecamatan-kecamatan seperti Jejangkit, Kuripan dan Cerbon, menunjukkan angka migrasi yang lebih rendah, yang mungkin mengindikasikan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, angka migrasi keluar sebesar 33,92 per 1.000 penduduk memberikan gambaran bahwa ada tekanan atau peluang di luar Kabupaten Barito Kuala yang menarik bagi penduduk untuk berpindah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab migrasi ini dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat mengurangi dampak negatifnya, seperti berkurangnya jumlah tenaga kerja atau peningkatan ketimpangan sosial antar wilayah.

3. Migrasi Neto

Angka Migrasi Netto (*Net Migration*) yaitu selisih antara migrasi masuk dan keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi netto negatif. Angka migrasi netto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dengan migran keluar per 1000 penduduk daerah tersebut.

Rumus :

$$\begin{aligned} MN &= \frac{\text{Banyaknya migran masuk} - \text{banyaknya migran keluar}}{\text{Banyaknya penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{11.017 - 11.362}{334.958} \times 1000 = -1,03 \end{aligned}$$

Angka Migrasi Netto Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah -1,03 Hal ini berarti angka migrasi masuk dan migrasi keluar hampir sama. Migrasi Netto Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah Migrasi Netto Negatif, perpindahan lebih banyak dibandingkan penduduk masuk.

Jadi Migrasi Netto Kota Barito Kuala Tahun 2025 adalah Migrasi Netto Negatif adalah 1 jiwa. Berikut Migrasi Netto Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 :

Tabel 3.37 Migrasi Netto

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	MIGRASI NETTO
1	TABUNGANEN	21.270	529	650	-5,69
2	TAMBAN	33.513	720	1.074	-10,56
3	ANJIR PASAR	18.229	434	511	-4,22
4	ANJIR MUARA	23.652	625	796	-7,23
5	ALALAK	68.000	4.050	2.774	18,76
6	MANDASTANA	18.595	501	677	-9,46
7	RANTAU BADAUH	17.370	391	463	-4,15
8	BELAWANG	14.627	372	441	-4,72
9	CERBON	10.483	331	345	-1,34
10	BAKUMPAI	11.452	292	335	-3,75
11	KURIPAN	6.189	139	259	-19,39
12	TABUKAN	9.729	259	360	-10,38
13	MEKARSARI	19.070	491	656	-8,65
14	BARAMBAI	16.689	439	518	-4,73
15	MARABAHAN	23.551	899	828	3,01
16	WANARAYA	15.540	348	420	-4,63
17	JEJANGKIT	6.999	197	255	-8,29
BARITO KUALA		334.958	11.017	11.362	-1,03

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Angka Migrasi Netto Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 menunjukkan nilai negatif sebesar -1,03. Angka ini menggambarkan bahwa jumlah migrasi keluar dari daerah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah migrasi masuk, yang berarti Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan jumlah penduduk akibat migrasi.

Secara spesifik, angka negatif ini mengindikasikan bahwa sekitar 1,03 per 1,000 penduduk meninggalkan wilayah ini lebih banyak daripada yang datang. Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa daerah ini mungkin kurang mampu menarik penduduk baru atau mempertahankan penduduknya, baik karena faktor ekonomi, kurangnya peluang kerja, atau mungkin ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan keterampilan penduduk setempat.

Meskipun angka migrasi netto ini relatif kecil, namun jika dibiarkan berlanjut, dapat berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia dan tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan migrasi keluar ini, seperti peningkatan lapangan kerja, kualitas pendidikan, dan fasilitas publik, guna mengurangi angka migrasi keluar dan menarik penduduk baru untuk menetap di daerah ini.

Diperlukan langkah strategis untuk menciptakan daya tarik bagi penduduk baik dari dalam maupun luar daerah agar angka migrasi netto menjadi lebih positif di masa depan

BAB V**KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDUDUK**

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan dan sebagainya. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi pelayanan kependudukan. Pemberian dokumen kependudukan bersifat *ste/sel* aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database kependudukan sesuai dengan dokumen dan realitas yang dimiliki penduduk

A. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen Kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan antara Kepala Keluarga beserta seluruh anggota keluarganya. Kartu keluarga merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, hubungan dengan kepala keluarga, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, NIK. Kartu keluarga harus dimutakhirkan setiap kali terjadi peristiwa mutasi kependudukan seperti kelahiran anak, kematian, perpindahan anggota keluarga, perkawinan, dan perceraian, serta perubahan pada pendidikan dan pekerjaan. Kepemilikan Kartu Keluarga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Jumlah Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2025

NO	KECAMATAN	KK	MEMILIKI KK	BELUM CETAK KK	TELAH CETAK KK (%)
1	TABUNGANEN	7.525	7.352	173	97,70
2	TAMBAN	11.841	11.684	157	98,67
3	ANJIR PASAR	6.522	6.430	92	98,59
4	ANJIR MUARA	8.118	8.050	68	99,16
5	ALALAK	22.148	22.006	142	99,36
6	MANDASTANA	6.305	6.241	64	98,98
7	RANTAU BADAUH	6.027	5.900	127	97,89
8	BELAWANG	5.183	5.125	58	98,88
9	CERBON	3.692	3.644	48	98,70
10	BAKUMPAI	4.074	4.015	59	98,55
11	KURIPAN	2.242	2.211	31	98,62
12	TABUKAN	3.421	3.389	32	99,06
13	MEKARSARI	6.600	6.502	98	98,52
14	BARAMBAI	5.666	5.631	35	99,38
15	MARABAHAN	8.071	8.012	59	99,27
16	WANARAYA	5.486	5.374	112	97,96
17	JEJANGKIT	2.388	2.356	32	98,66
BARITO KUALA		115.309	113.922	1.387	98,80

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data rekapitulasi kepemilikan Kartu Keluarga (KK), terlihat bahwa mayoritas penduduk telah memiliki KK sebagai dokumen administrasi dasar dalam sistem kependudukan. Capaian ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup baik terhadap pentingnya dokumen kependudukan dalam mengakses layanan publik.

Sebagian kecil penduduk tercatat belum memiliki KK. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perpindahan domisili yang belum dilaporkan, pernikahan baru yang belum dicatat secara administratif, atau kendala akses ke layanan administrasi.

Upaya peningkatan cakupan kepemilikan KK perlu terus dilakukan melalui edukasi, pelayanan jemput bola, serta penyederhanaan proses administrasi agar seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan secara lengkap dan sah

Pada tabel diatas Kalau dilihat dari persentase Kepemilikan Kartu Keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Barambai yaitu (99,38%) menyusul kecamatan Alalak (99,36%). sedangkan Kepemilikan Kartu Keluarga terendah di Kecamatan Tabunganen yaitu 97,70%.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el)

Kartu Tanda Penduduk elektronik selanjutnya disingkat KTP – el merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. KTP – el ini wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah. Dengan segala keperluan KTP- el, penduduk dapat dengan mudah

mengurus semua yang berkaitan dengan Legislatif, sebagai contoh urusan dengan Bank, mengurus Jamkesmas, untuk mengurus Perkawinan, dan lain sebagainya

Tabel 5.2

**JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	WKTP DINAMIS	PROGRES REKAM	PROGRES BELUM REKAM	KEPEMILIKAN KTP -el	% KEPEMILIKAN KTP - el
1	TABUNGANEN	15.604	15.411	193	15.282	99,16
2	TAMBAN	25.244	25.062	182	24.951	99,56
3	ANJIR PASAR	13.660	13.515	145	13.468	99,65
4	ANJIR MUARA	17.319	17.138	181	17.076	99,64
5	ALALAK	49.041	48.430	611	48.195	99,51
6	MANDASTANA	13.502	13.360	142	13.318	99,69
7	RANTAU BADAUH	12.893	12.732	161	12.690	99,67
8	BELAWANG	10.961	10.837	124	10.790	99,57
9	CERBON	7.825	7.753	72	7.737	99,79
10	BAKUMPAI	8.509	8.417	92	8.387	99,64
11	KURIPAN	4.634	4.591	43	4.581	99,78
12	TABUKAN	7.030	6.950	80	6.923	99,61
13	MEKARSARI	14.154	14.030	124	14.008	99,84
14	BARAMBAI	12.295	12.182	113	12.142	99,67
15	MARABAHAN	17.533	17.380	153	17.333	99,73
16	WANARAYA	11.550	11.412	138	11.360	99,54
17	JEJANGKIT	5.155	5.114	41	5.094	99,61
BARITO KUALA		246.909	244.314	2.595	243.335	99,60

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data target dan realisasi perekaman KTP elektronik (KTP-el), secara umum capaian kepemilikan KTP-el menunjukkan tren positif. Sebagian besar penduduk yang wajib KTP telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el.

Persentase kepemilikan KTP-el berada pada kisaran tinggi, menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas ini cukup tinggi. Di beberapa wilayah, capaian bahkan mendekati atau mencapai 100%. Namun, masih terdapat beberapa kecamatan/desa yang persentasenya berada di bawah target, sehingga perlu perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi belum optimalnya perekaman di beberapa daerah antara lain: lokasi geografis yang sulit dijangkau, kurangnya informasi, atau kendala teknis dalam proses perekaman. Oleh karena itu, strategi seperti pelayanan jemput bola dan integrasi data antarinstansi menjadi penting untuk meningkatkan kepemilikan KTP-el secara merata.

C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang menjadi bukti bahwa orang tersebut

diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Dengan memiliki KIA, seorang anak dapat dengan mudah mengurus legalitas administrasi serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, pendidikan dan sebagainya, proporsi penduduk yang sudah memiliki KIA disajikan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KECAMATAN	WAJIB KIA			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			KEPEMILIKAN KIA (%)
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TABUNGANEN	2.906	2.760	5.666	2.644	2.508	5.152	262	252	514	90,93
2	TAMBAN	4.228	4.042	8.270	3.849	3.678	7.527	379	364	743	91,02
3	ANJIR PASAR	2.339	2.230	4.569	2.067	1.992	4.059	272	238	510	88,84
4	ANJIR MUARA	3.281	3.053	6.334	2.880	2.686	5.566	401	367	768	87,87
5	ALALAK	9.729	9.231	18.960	8.672	8.293	16.965	1.057	938	1.995	89,48
6	MANDASTANA	2.612	2.481	5.093	2.399	2.290	4.689	213	191	404	92,07
7	RANTAU BADAUH	2.284	2.194	4.478	2.111	2.033	4.144	173	161	334	92,54
8	BELAWANG	1.905	1.762	3.667	1.790	1.659	3.449	115	103	218	94,06
9	CERBON	1.349	1.309	2.658	1.178	1.136	2.314	171	173	344	87,06
10	BAKUMPAI	1.547	1.396	2.943	1.472	1.321	2.793	75	75	150	94,9
11	KURIPAN	810	745	1.555	771	704	1.475	39	41	80	94,86
12	TABUKAN	1.345	1.355	2.700	1.235	1.244	2.479	110	111	221	91,81
13	MEKARSARI	2.557	2.359	4.916	2.442	2.233	4.675	115	126	241	95,1
14	BARAMBAI	2.251	2.143	4.394	2.101	2.017	4.118	150	126	276	93,72
15	MARABAHAN	3.105	2.913	6.018	2.777	2.644	5.421	328	269	597	90,08
16	WANARAYA	2.093	1.898	3.991	2.028	1.842	3.870	65	56	121	96,97
17	JEJANGKIT	961	883	1.844	935	862	1.797	26	21	47	97,45
	BARITO KUALA	45.302	42.754	88.056	41.351	39.142	80.493	3.951	3.612	7.563	91,41

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data rekapitulasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), terlihat bahwa program penerbitan KIA telah berjalan dengan cukup baik di sebagian besar wilayah. Persentase rata-rata kepemilikan KIA menunjukkan angka yang terus meningkat, menandakan adanya kesadaran masyarakat dan upaya aktif dari pemerintah daerah dalam mendukung tertib administrasi kependudukan sejak usia dini.

Meskipun demikian, masih terdapat wilayah-wilayah dengan persentase kepemilikan KIA yang relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi masyarakat mengenai manfaat KIA, keterbatasan akses terhadap layanan kependudukan, serta belum optimalnya integrasi pelayanan antara sekolah, fasilitas kesehatan, dan dinas kependudukan.

Pemerintah daerah diharapkan terus mendorong upaya percepatan pencetakan KIA melalui pendekatan inovatif seperti pelayanan jemput bola, integrasi layanan saat pendaftaran sekolah, serta edukasi langsung kepada masyarakat.

Sebagaimana disajikan pada tabel 5.3 dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 334.958 jiwa yang semestinya memiliki KIA sebanyak 88.056 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang sudah memiliki KIA sebanyak 80.493 jiwa (91,41%).

D. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Di era digitalisasi yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem identitas yang cepat, aman, dan efisien menjadi semakin mendesak. Menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi terbaru dalam transformasi pelayanan publik.

IKD adalah bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dapat diakses melalui aplikasi di perangkat pintar. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses verifikasi identitas warga negara secara online tanpa harus membawa dokumen fisik, serta memperkuat sistem keamanan data penduduk secara nasional.

Pelaksanaan aktivasi IKD di seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas. Dukungan aktif dari pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya transformasi ini. Oleh karena itu, upaya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terus dilakukan secara masif dan terstruktur, baik melalui kegiatan langsung maupun media digital. Berikut data yang sudah melakukan aktivasi IKD di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 5.4 Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Se- Kabupaten Barito Kuala

NO	KECAMATAN	JUMLAH IKD	WAJIB KTP SUDAH REKAM	PROGRESS (%)
1	TABUNGANEN	15.376	920	5,98
2	TAMBAN	25.049	2.378	9,49
3	ANJIR PASAR	13.495	592	4,39
4	ANJIR MUARA	17.136	824	4,81
5	ALALAK	48.242	3.091	6,41
6	MANDASTANA	13.359	933	6,98
7	RANTAU BADAUH	12.724	486	3,82
8	BELAWANG	10.841	479	4,42
9	CERBON	7.745	414	5,35
10	BAKUMPAI	8.395	498	5,93
11	KURIPAN	4.592	291	6,34
12	TABUKAN	6.954	340	4,89
13	MEKARSARI	14.020	1.143	8,15
14	BARAMBAI	12.145	894	7,36
15	MARABAHAN	17.354	2.278	13,13
16	WANARAYA	11.376	1.076	9,46
17	JEJANGKIT	5.117	312	6,1
BARITO KUALA		243.920	16.949	6,95

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan data jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025, tercatat total 16.949 aktivasi dari 243.920 wajib KTP yang telah terekam. Angka ini menunjukkan progres pencatatan identitas digital yang mencapai 6,95% di tingkat kabupaten secara keseluruhan. Beberapa kecamatan dengan progres aktivasi IKD tertinggi meliputi Marabahan dengan 13,13%, Tamban dengan 9,49% dan Wanaraya dengan 9,46%. Sementara itu, kecamatan dengan progres aktivasi IKD yang lebih rendah antara lain Rantau Badauh dengan 3,82%, Anjir Pasar dengan 4,39%, dan Belawang dengan 4,42%.

Pencapaian aktivasi IKD yang bervariasi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat adopsi identitas digital di berbagai kecamatan. Kecamatan dengan progres lebih tinggi mungkin memiliki infrastruktur yang lebih baik atau kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya aktivasi IKD. Sebaliknya, kecamatan dengan progres rendah mungkin memerlukan perhatian lebih dalam hal penyuluhan, kemudahan akses, atau dukungan teknis.

Untuk mempercepat adopsi IKD di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam memperkenalkan manfaat IKD kepada masyarakat, serta memastikan bahwa proses aktivasi lebih mudah diakses oleh semua penduduk. Hal ini akan memperkuat sistem administrasi kependudukan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan publik berbasis digital.

E. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen legal untuk menunjukkan hubungan keperdataan seseorang dengan orang lainnya adapun jenis akta diantaranya :

1. Akta Kelahiran

Akta Pencatatan Sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara, yakni catatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia, yang terjadi dalam keluarga dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti peristiwa Kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengesehan anak dan lain-lain.

Akta kelahiran terkait dengan kependataan orang tua. Jadi dokumen kependudukan seperti halnya akta juga wajib dimiliki oleh penduduk dalam kaitannya dengan hak kependataan tersebut ini.

Tabel 5.5 Kepemilikan Akta Kelahiran Seluruh Usia

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			PERSEN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TABUNGANEN	10.698	10.363	21.061	5.631	5.468	11.099	5.067	4.895	9.962	52,70
2	TAMBAN	16.922	16.354	33.276	8.318	8.014	16.332	8.604	8.340	16.944	49,08
3	ANJIR PASAR	9.116	9.003	18.119	4.876	4.769	9.645	4.240	4.234	8.474	53,23
4	ANJIR MUARA	11.910	11.618	23.528	5.938	5.670	11.608	5.972	5.948	11.920	49,34
5	ALALAK	34.091	33.493	67.584	17.795	17.225	35.020	16.296	16.268	32.564	51,82
6	MANDASTANA	9.353	9.155	18.508	4.937	4.778	9.715	4.416	4.377	8.793	52,49
7	RANTAU BADAUH	8.699	8.597	17.296	4.415	4.304	8.719	4.284	4.293	8.577	50,41
8	BELAWANG	7.394	7.136	14.530	3.665	3.359	7.024	3.729	3.777	7.506	48,34
9	CERBON	5.281	5.157	10.438	2.676	2.582	5.258	2.605	2.575	5.180	50,37
10	BAKUMPAI	5.907	5.493	11.400	2.946	2.645	5.591	2.961	2.848	5.809	49,04
11	KURIPAN	3.158	2.992	6.150	1.801	1.696	3.497	1.357	1.296	2.653	56,86
12	TABUKAN	4.883	4.783	9.666	2.772	2.748	5.520	2.111	2.035	4.146	57,11
13	MEKARSARI	9.632	9.325	18.957	5.456	5.173	10.629	4.176	4.152	8.328	56,07
14	BARAMBAI	8.407	8.195	16.602	4.681	4.553	9.234	3.726	3.642	7.368	55,62
15	MARABAHAN	11.718	11.746	23.464	6.562	6.567	13.129	5.156	5.179	10.335	55,95
16	WANARAYA	7.886	7.549	15.435	4.072	3.854	7.926	3.814	3.695	7.509	51,35
17	JEJANGKIT	3.564	3.387	6.951	1.804	1.736	3.540	1.760	1.651	3.411	50,93
BARITO KUALA		168.619	164.346	332.965	88.345	85.141	173.486	80.274	79.205	159.479	52,10

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran di seluruh usia di Kabupaten Barito Kuala, tercatat 52,10% dari total penduduk yang memiliki akta kelahiran, dengan perbedaan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Secara total, terdapat 332.965 individu yang wajib memiliki akta kelahiran, terdiri dari 168.619 laki-laki dan 164.346 perempuan. Dari jumlah tersebut, 173.486 orang telah memiliki akta kelahiran, sementara 1159.479 orang lainnya masih belum memilikinya. Beberapa kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Tabukan dengan 57,11%, Kuripan dengan 56,86%, Mekarsari dengan 56,07% dan Marabahan dengan 55,95%.

Kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terendah meliputi Belawang dengan 48,34%, Bakumpai dengan 49,04% dan Tamban dengan 49,08%.

Secara umum, kecamatan yang memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih baik atau akses yang lebih mudah ke layanan pembuatan akta kelahiran. Sebaliknya, kecamatan dengan persentase rendah mungkin menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi, aksesibilitas, atau adanya kendala administratif dalam pembuatan akta kelahiran.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya untuk memperbaiki distribusi layanan kepemilikan akta kelahiran ini, khususnya di kecamatan yang masih memiliki angka rendah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh warga memiliki identitas yang sah dan dapat memperoleh hak-haknya dengan baik.

Sedangkan cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Kepemilikan akta kelahiran usia 0-5 Tahun

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			PERSEN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TABUNGANEN	796	756	1.552	749	713	1.462	47	43	90	94,20
2	TAMBAN	1.138	1.076	2.214	1.122	1.052	2.174	16	24	40	98,19
3	ANJIR PASAR	654	623	1.277	634	603	1.237	20	20	40	96,87
4	ANJIR MUARA	921	810	1.731	869	755	1.624	52	55	107	93,82
5	ALALAK	2.834	2.566	5.400	2.698	2.460	5.158	136	106	242	95,52
6	MANDASTANA	753	742	1.495	739	730	1.469	14	12	26	98,26
7	RANTAU BADAUH	650	618	1.268	629	597	1.226	21	21	42	96,69
8	BELAWANG	553	519	1.072	531	504	1.035	22	15	37	96,55
9	CERBON	334	379	713	332	379	711	2	0	2	99,72
10	BAKUMPAI	473	456	929	457	444	901	16	12	28	96,99
11	KURIPAN	249	229	478	247	229	476	2	0	2	99,58
12	TABUKAN	388	381	769	384	379	763	4	2	6	99,22
13	MEKARSARI	670	684	1.354	655	661	1.316	15	23	38	97,19
14	BARAMBAI	640	584	1.224	635	581	1.216	5	3	8	99,35
15	MARABAHAN	959	856	1.815	957	856	1.813	2	0	2	99,89
16	WANARAYA	644	530	1.174	641	528	1.169	3	2	5	99,57
17	JEJANGKIT	277	264	541	273	259	532	4	5	9	98,34
BARITO KUALA		12.933	12.073	25.006	12.552	11.730	24.282	381	343	724	97,10

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 31 Desember 2025

Tabel 5.7 Kepemilikan Akta kelahiran usia 0 -18 tahun

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			(%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TABUNGANEN	3.050	2.894	5.944	2.924	2.773	5.697	126	121	247	95,84
2	TAMBAN	4.478	4.267	8.745	4.357	4.159	8.516	121	108	229	97,38
3	ANJIR PASAR	2.466	2.333	4.799	2.411	2.290	4.701	55	43	98	97,96
4	ANJIR MUARA	3.441	3.212	6.653	3.335	3.119	6.454	106	93	199	97,01
5	ALALAK	10.213	9.718	19.931	9.811	9.341	19.152	402	377	779	96,09
6	MANDASTANA	2.742	2.623	5.365	2.677	2.569	5.246	65	54	119	97,78
7	RANTAU BADAUH	2.410	2.312	4.722	2.359	2.257	4.616	51	55	106	97,76
8	BELAWANG	2.028	1.840	3.868	1.976	1.795	3.771	52	45	97	97,49
9	CERBON	1.434	1.392	2.826	1.397	1.359	2.756	37	33	70	97,52
10	BAKUMPAI	1.636	1.493	3.129	1.601	1.467	3.068	35	26	61	98,05
11	KURIPAN	860	779	1.639	856	774	1.630	4	5	9	99,45
12	TABUKAN	1.395	1.431	2.826	1.380	1.413	2.793	15	18	33	98,83
13	MEKARSARI	2.691	2.475	5.166	2.664	2.442	5.106	27	33	60	98,84
14	BARAMBAI	2.383	2.262	4.645	2.338	2.228	4.566	45	34	79	98,30
15	MARABAHAN	3.296	3.069	6.365	3.265	3.048	6.313	31	21	52	99,18
16	WANARAYA	2.209	2.007	4.216	2.190	1.998	4.188	19	9	28	99,34
17	JEJANGKIT	1.009	926	1.935	1.002	918	1.920	7	8	15	99,22
BARITO KUALA		47.741	45.033	92.774	46.543	43.950	90.493	1.198	1.083	2.281	97,54

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Barito Kuala, tercatat bahwa 97,54% dari jumlah anak yang wajib memiliki akta kelahiran sudah memilikinya. Dari total 90.493 anak yang wajib memiliki akta kelahiran (terdiri dari 47.741 laki-laki dan 45.033 perempuan), sebanyak 90.493 anak telah memiliki akta kelahiran, sementara 1.083 anak lainnya masih belum memiliki.

Beberapa kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Kuripan dengan 99,45%, Wanaraya dengan 99,34%, Jejangkit dengan 99,22%, Marabahan dengan 99,12%, dan Mekarsari dengan 98,84%.

Di sisi lain, kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran lebih rendah, meskipun tetap tinggi, adalah Tabunganen dengan 95,84%, dan Alalak dengan 96,09%.

Secara keseluruhan, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat baik dalam hal kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun, dengan persentase lebih dari 95% di hampir semua kecamatan. Namun, masih terdapat sejumlah kecil anak yang belum memiliki akta kelahiran, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mencapai 100% kepemilikan akta kelahiran untuk seluruh anak di daerah ini.

Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak, terutama yang berada di kecamatan dengan angka kepemilikan lebih rendah, mendapatkan akta kelahiran mereka, guna menjamin hak mereka dalam administrasi kependudukan dan akses terhadap layanan publik.

2. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang merupakan identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang sudah berlaku. Sebagai contoh kepemilikan akta kematian digunakan untuk pengesahan hak waris, urusan kepegawaian atau asuransi dan lain sebagainya.

Tabel 5.8 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Tahun 2025

NO	KECAMATAN	CETAK AKTA KEMATIAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	422	362	784
2	TAMBAN	512	344	856
3	ANJIR PASAR	213	221	434
4	ANJIR MUARA	458	340	798
5	ALALAK	1064	677	1.741
6	MANDASTANA	317	252	569
7	RANTAU BADAUH	320	247	567
8	BELAWANG	198	161	359
9	CERBON	132	109	241
10	BAKUMPAI	186	158	344
11	KURIPAN	102	75	177
12	TABUKAN	83	54	137
13	MEKARSARI	335	233	568
14	BARAMBAI	284	191	475
15	MARABAHAN	502	330	832
16	WANARAYA	140	114	254
17	JEJANGKIT	98	73	171
KAB. BARITO KUALA		5.396	3.961	9.357

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 31 Desember 2025

Dari Tabel 5.8 terlihat bahwa jumlah penerbitan akta kematian selama Tahun 2025 berjumlah 9.357 akta kematian, Rendahnya angka penduduk yang memiliki akta kematian tidak berarti rendahnya masyarakat yang meninggal pada tahun tersebut, tapi lebih kepada kurangnya kesadaran masyarakat dan rasa enggan untuk melaporkan kejadian kematian kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

3. Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tabel 5.9 menyajikan data penduduk Kabupaten Barito Kuala yang menikah pada tahun 2025 dan memiliki akta perkawinan

Tabel 5.9 Kepemilikan Akta Perkawinan

	KECAMATAN	WAJIB AKTA KAWIN	MEMILIKI AKTA KAWIN	BELUM MEMILIKI AKTA KAWIN	KEPEMILIKAN AKTA KAWIN (%)
1	TABUNGANEN	10.814	4.142	6.672	38,3
2	TAMBAN	16.499	10.236	6.263	62,04
3	ANJIR PASAR	8.677	5.264	3.413	60,67
4	ANJIR MUARA	11.290	7.157	4.133	63,39
5	ALALAK	31.709	20.804	10.905	65,61
6	MANDASTANA	9.195	6.061	3.134	65,92
7	RANTAU BADAUH	8.644	4.815	3.829	55,7
8	BELAWANG	7.153	4.481	2.672	62,65
9	CERBON	5.162	2.978	2.184	57,69
10	BAKUMPAI	5.608	3.439	2.169	61,32
11	KURIPAN	3.218	1.929	1.289	59,94
12	TABUKAN	4.792	2.739	2.053	57,16
13	MEKARSARI	9.162	6.071	3.091	66,26
14	BARAMBAI	8.128	5.475	2.653	67,36
15	MARABAHAN	11.363	7.946	3.417	69,93
16	WANARAYA	8.194	5.268	2.926	64,29
17	JEJANGKIT	3.405	1.999	1.406	58,71
	BARITO KUALA	163.013	100.804	62.209	61,84

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan data kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Barito Kuala, tercatat bahwa dari 163.013 penduduk yang wajib memiliki akta kawin, baru 100.804 jiwa (atau sekitar 61,84%) yang telah memilikinya. Sementara itu, 62.209 jiwa (sekitar 38,16%) lainnya belum memiliki dokumen tersebut. capaian kepemilikan akta kawin di Kabupaten Barito Kuala masih memerlukan perhatian dan peningkatan. Akta kawin merupakan dokumen penting sebagai bukti sah pernikahan yang memiliki implikasi hukum dan administrasi, seperti pencatatan kependudukan, pengurusan dokumen

anak, hingga kepastian hukum dalam hak waris dan lainnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pelayanan keliling, dan integrasi program dengan instansi keagamaan atau pencatatan sipil untuk meningkatkan kepemilikan akta kawin, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan persentase yang masih rendah.

4. Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki bagi pasangan yang sudah cerai hidup maupun pasangan yang sudah cerai mati. untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala Data kepemilikan akta perceraian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.10 Kepemilikan Akta Perceraian

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA CERAI	MEMILIKI AKTA CERAI	BELUM MEMILIKI AKTA CERAI	KEPEMILIKAN AKTA CERAI (%)
1	TABUNGANEN	294	56	238	19,05
2	TAMBAN	611	214	397	35,02
3	ANJIR PASAR	483	179	304	37,06
4	ANJIR MUARA	530	170	360	32,08
5	ALALAK	1.408	733	675	52,06
6	MANDASTANA	297	129	168	43,43
7	RANTAU BADAUH	346	115	231	33,24
8	BELAWANG	329	85	244	25,84
9	CERBON	237	106	131	44,73
10	BAKUMPAI	247	98	149	39,68
11	KURIPAN	101	30	71	29,70
12	TABUKAN	208	50	158	24,04
13	MEKARSARI	398	122	276	30,65
14	BARAMBAI	337	141	196	41,84
15	MARABAHAN	560	290	270	51,79
16	WANARAYA	255	80	175	31,37
17	JEJANGKIT	128	42	86	32,81
BARITO KUALA		6.769	2.640	4.129	39,00

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 31 Desember 2025

Jika dilihat menurut wilayah, maka persentase penduduk berstatus cerai dan memiliki akta perceraian tertinggi berada pada Kecamatan Alalak yaitu 52,06 persen, diikuti Kecamatan Marabahan 51,79 persen sedangkan yang terendah di Kecamatan Tabunganen yaitu 19,05 persen. Tingkat kepemilikan akta cerai yang masih relatif rendah menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang belum mengurus dokumen resmi perceraian mereka. Padahal, akta cerai sangat penting sebagai bukti hukum atas status pernikahan yang telah berakhir secara sah dan berimplikasi pada berbagai aspek hukum dan administrasi, termasuk hak asuh anak, hak waris, dan pembagian harta bersama.

Perlu adanya untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta cerai, melalui:

- Edukasi dan sosialisasi hukum keluarga,
- Fasilitasi layanan terpadu pengurusan akta cerai,
- Kolaborasi antara pengadilan agama dan dinas kependudukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka kepemilikan akta cerai di Kabupaten Barito Kuala dapat meningkat secara signifikan.

BAB VI

KESIMPULAN

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang professional.

Secara umum, Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek kependudukan, seperti peningkatan jumlah penduduk dan tingginya kepemilikan akta kelahiran pada usia 0–18 tahun. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal migrasi keluar yang lebih tinggi dibandingkan masuk, serta rendahnya tingkat aktivasi IKD dan kepemilikan akta perkawinan dan cerai. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Di sisi lain masih banyak potensi data kependudukan yang harus kami gali sehingga dapat dijadikan pijakan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, khususnya data pencatatan perkawinan dan pencatatan sipil, sehingga data Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi lebih baik.

Akurasi dan validasi data ini juga dipengaruhi oleh kesadaran Masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala , disamping peran aktif aparatur/petugas dan Masyarakat dalam melakukan peran stelsel aktif untuk pelayanan publik.

MACAM-MACAM INOVASI LAYANAN DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BARITO KUALA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Kuala terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi layanan. Inovasi-inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil maupun yang memiliki keterbatasan akses. Berikut beberapa inovasi unggulan yang diterapkan:

1. DUKCAPIL DEKAT (Datang, Edukasi, Melayani Masyarakat)

“DUKCAPIL DEKAT” merupakan Inovasi Mobil layanan Kependudukan untuk memberikan pelayanan prima, inklusif dan proaktif demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh wilayah kabupaten Barito Kuala. Pelaksanaan Inovasi “Dukcapil Dekat” yaitu Pelayanan Keliling yang di bagi menjadi 4 kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan ke Pasar – pasar di 17 kecamatan
- b. Pelayanan Perekaman/Penerbitan KTP-el dan IKD di desa – desa
- c. Pelayanan Perekaman/Penerbitan KTP-el dan IKD ke sekolah -sekolah lanjutan tingkat Atas
- d. Pelayanan Fasilitas SKPWNl bagi Penduduk Non Permanen

2. TARUMADOKBIT (Daftar di Rumah, Dokumen Terbit)

Inovasi ini mendorong digitalisasi pelayanan dengan menggunakan aplikasi berbasis Web Portal yang bisa di akses menggunakan internet melalui laman Web <http://tarumadokbit-dukcapil.baritokualakab.go.id/>

Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk **mengurus dokumen kependudukan dari rumah** tanpa perlu datang ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala. Pengajuan dilakukan secara daring (online). Setelah dokumen selesai diproses, masyarakat dapat langsung menerima dokumen tanpa harus antri.

3. PAKRS (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit)

Melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Aziz Marabahan, Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala memberikan layanan bagi warga yang baru melahirkan berupa penerbitan **Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA)** melalui aplikasi **TARUMADOKBIT** dan untuk pembuatannya di bantu oleh pihak Rumah Sakit tanpa harus ke kantor Dinas Dukcapil.

4. PAKODE (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)

Untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat layanan, **Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala** bekerja sama dengan **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala** melalui aplikasi berbasis Web portal yang di beri nama **“Si Lisa” (Sisitem Informasi Layanan Pemerintah Desa)** dengan memanfaatkan para perangkat desa



yang ada di seluruh Kabupaten Barito Kuala untuk membantu masyarakat mengurus pembuatan **Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga dan Pindah Datang**.

5. KANDA (Kami Datang Dokumen Tercetak)

KANDA adalah salah satu inovasi layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala dengan cara mengadakan jemput bola layanan keliling ke desa-desa. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti **perekaman e-KTP, perbaikan data, serta pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil** secara langsung di desa. Inovasi ini bertujuan untuk pemerataan layanan dan peningkatan partisipasi warga dalam tertib administrasi.



6. Gambar Inovasi Layanan

APLIKASI
TARUMA DOKBIT

DAFTAR DIRUMAH DOKUMEN TERBIT

Aplikasi Layanan
Online Berbasis WEB

- AKTA KELAHIRAN
- AKTA KEMATIAN
- PINDAH DATANG

KONTAK INFORMASI
WA : +62 813-5294-6242

<https://dukcapil.baritokualakab.go.id>

dukcapilbarito

@dukcapil_baritokuala

PAKRS

PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI RUMAH SAKIT

KERJASAMA DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN BARITO KUALA
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH H. ABDUL AZIS
MARABAHAN.

KARTU
KELUARGA

AKTA
KELAHIRAN

<https://dukcapil.baritokualakab.go.id>

dukcapilbarito

@dukcapil_baritokuala



PAKODE
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DESA

KERJASAMA DINAS DUKCAPIL KABUPATEN
BARITO KUALA DENGAN SELURUH PEMERINTAH
DESA LINGKUP KABUPATEN BARITO KUALA
MELALUI APLIKASI LAYANAN BERBASIS WEB

Si LISA
SISTEM INFORMASI LAYANAN
PEMERINTAH DESA

<https://dukcapil.baritokualakab.go.id> [dukcapilbatola](#) [@disdukcapil_baritokuala](#)

"KANDA"
KAMI DATANG DOKUMEN TERCETAK

PELAYANAN KELILING
JEMPUT BOLA KE
SELURUH DESA DAN
KECAMATAN
LINGKUP KABUPATEN
BARITO KUALA

MELAYANI

1. KARTU KELUARGA
2. KTP ELEKTRONIK
3. KARTU IDENTITAS ANAK
4. IKD
5. AKTA PENDATATAN SIPIL

<https://dukcapil.baritokualakab.go.id> [dukcapilbatola](#) [@disdukcapil_baritokuala](#)